



LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Ditjen Perikanan Budidaya dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 21014 tentang Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya di masa mendatang.

Jakarta Februari 2023

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

TB. Haeru Rahayu



Daftar Isi

KATA Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tugas dan Fungsi Organisasi	2
Sumberdaya Manusia	4
Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya.....	5
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	6
Perencanaan dan Penetapan Kinerja	7
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya	7
Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	9
INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	11
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	13
Akuntabilitas Kinerja	14
Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Analisa Capaian Kinerja	15
SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya	15
SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat	21
SS.3. Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan.....	24
SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	27
SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	38
SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	41
Efisiensi	63
Kinerja Anggaran.....	67
Kesimpulan.....	67
LAMPIRAN	68



Daftar Tabel

1.	Keselarasan target IKU Pada Renstra 2020-2024 dan PK 2022	10
2.	Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022.....	12
3.	Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022	14
4.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2020.....	17
5.	Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2022.....	17
6.	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2020.....	18
7.	Bantuan Pemerintah di 130 (Seratus Tiga Puluh) Kampung Perikanan Budidaya	24
8.	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022.....	28
9.	Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2022 ** (1000 ekor).....	37
10.	Capaian Tenaga Kerja Terlibat Bidang Perikanan Budidaya	38
11.	Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Tahun 2022	40
12.	Data Sampel Pengujian Sampel <i>Non Compliance</i> Tahun 2022.....	40
13.	Capaian IP ASN Tahun 2022 Eselon I lingkup KKP.....	44
14.	Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2013-2022	45
15.	Inovasi dilingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang diikuti sertakan dalam KIPP Tahun 2022.....	52
16.	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021	54
17.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan IV Tahun 2022 dan 2021.....	65
18.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2022 dan 2021.....	65



Daftar Gambar

1.	Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya	3
2.	Jumlah pegawai Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan Unit Kerja	4
3.	Jumlah pegawai Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan tingkat pendidikan	4
4.	Potensi Perikanan Budidaya	5
5.	Dashboard capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022.....	14
6.	Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2022	16
7.	Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2022.....	19
8.	Peta Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2022	19
9.	Struktur Biaya Operasional Pembudidaya Ikan Beberapa Komoditas Utama.....	21
10.	Capaian Nilai PM SAKIP Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2022	48
11.	Perbandingan Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti.....	51
12.	Perbandingan Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Unit Eselon I Lingkup KKP	52
13.	Capaian IKU Inovasi Layanan Publik KKP Tahun 2022.....	53
14.	Capaian IKPA Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2022.....	57
15.	Tangkapan Layar Nilai NKA Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dari aplikasi SMART DJA	58
16.	Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran KKP Tahun 2022.....	60
17.	Perbandingan capaian IKU tingkat kepatuhan PBJ Tahun 2022.....	61
18.	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP Tahun 2022.....	63
19.	Nilai Efisiensi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 pada aplikasi SMART DJA	64
20.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022	65



Daftar Lampiran

Lampiran 1. PK awal Tahun 2022	68
Lampiran 2. PK Revisi Tahun 2022.....	70



Ikhtisar Eksekutif

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan pada Perpres 18 Tahun 2020 dan Renstra Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2020- 2024. Hasil evaluasi kinerja tahun 2022 ini mempunyai makna strategis sebagai momentum perbaikan di tahun berikutnya untuk mencapai target akhir Renstra Ditjen Perikanan Budidaya 2020-2024.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 terdiri dari 6 Sasaran Strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ditjen Perikanan Budidaya Nomor 66 KEP/DIRJEN PB/2022 tentang penetapan IKU Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya. Pada tahun 2022, terdapat penyesuaian Perjanjian Kinerja dengan adanya refocusing anggaran sebanyak tiga kali diiringi dengan penyesuaian target Indikator kinerja utama. Hal tersebut dilakukan karena adanya pengurangan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama serta adanya faktor-faktor eksternal dalam rangka menindaklanjuti arahan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Ditjen Perikanan Budidaya serta kondisi dinamika nasional antara lain peningkatan kegiatan budidaya dalam rangka mencapai visi pembangunan kelautan dan perikanan serta penghematan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Ditjen Perikanan Budidaya.

Capaian kinerja tahun 2022 secara keseluruhan termasuk berhasil, hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 106,14% , capaian ini lebih baik dari pada capaian tahun 2021 yang mencapai 105,04%

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan budidaya akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan Budidaya yang berkelanjutan. Dari hasil evaluasi capaian kinerja 22 IKU, 20 IKU (90,90%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target dan 2 IKU (9,10%) capaiannya belum memenuhi target.



Pendahuluan

Latar Belakang

Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan dan produk seafood dunia yang paling pesat perkembangannya, termasuk di Indonesia. Rata-rata peningkatan produksi perikanan budidaya Indonesia yang diproyeksikan FAO (2022) adalah 26% per tahun atau lebih tinggi 5% dibandingkan rata-rata proyeksi peningkatan produksi perikanan budidaya dunia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, meningkatnya kesadaran akan makanan yang sehat dan menyehatkan serta pengurangan ketersediaan lahan teresterial proyeksi produksi perikanan budidaya akan meningkat drastis.

Pertumbuhan perikanan budidaya di masa mendatang merupakan bagian kunci dalam menyediakan pasokan ikan dalam sistem perikanan untuk pangan nasional, regional dan dunia; menghasilkan pajak dan devisa, menciptakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha; dan menjaga ikan agar tersedia di tingkat harga yang layak bagi konsumen yang miskin sumberdaya; serta pelestarian plasma nutfah dan keragaman jenis ikan Indonesia. Beberapa penelitian juga membuktikan kontribusi aktivitas perikanan budidaya dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Budidaya rumput laut selama pemeliharaan menyerap karbon dalam proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Dengan demikian pembangunan perikanan budidaya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat serta dapat diselaraskan dengan kepentingan ekologi.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budidaya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat dicapai dengan prinsip-prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru diterapkan dalam upaya mengharmoniskan aspek lingkungan dan sosial dengan target pencapaian ekonomi. Pada prinsipnya ekonomi biru menitikberatkan keberlangsungan ekologi guna keberlanjutan



hidup manusia, dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian kegiatan perikanan budidaya dilakukan secara seimbang sebagai *win – win solution* terhadap aspek lingkungan dan sosial, melalui kegiatan budidaya perikanan yang inovatif, maju, modern yang dapat berjalan maksimal dan memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan sehat dengan tetap memperhatikan *caring capacity* atau dukungan lingkungan. Sehingga pada akhirnya sistem budidaya perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat dicapai.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam enam perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

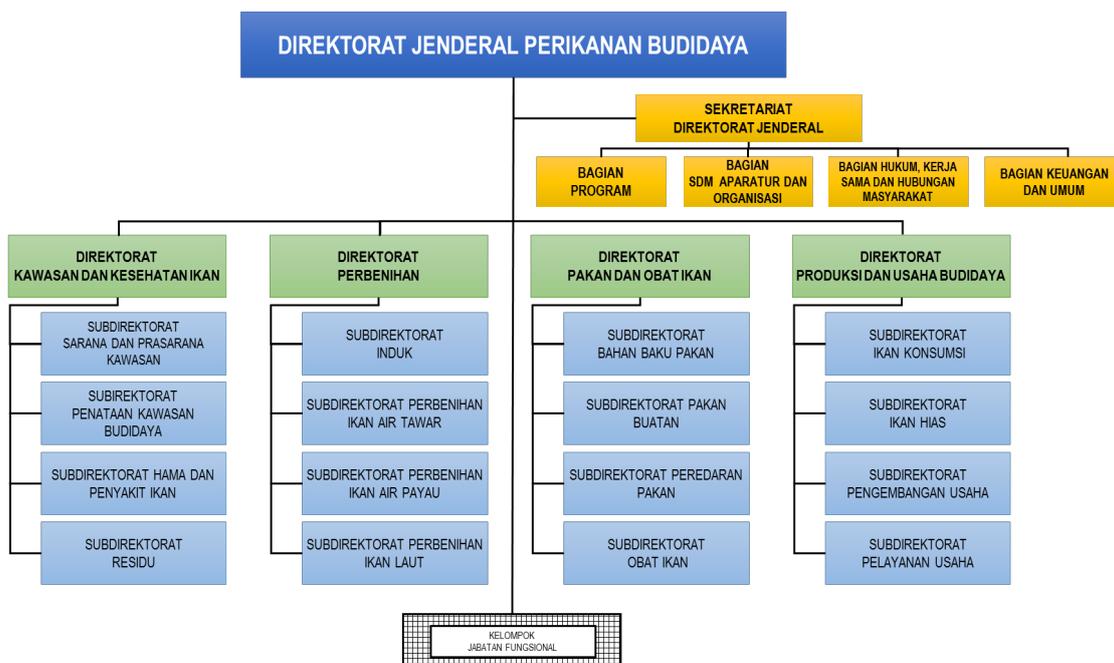
Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas



prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; v) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya; vi) pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan vii) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perikanan Budidaya

Selain itu Ditjen Perikanan Budidaya juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya meliputi:

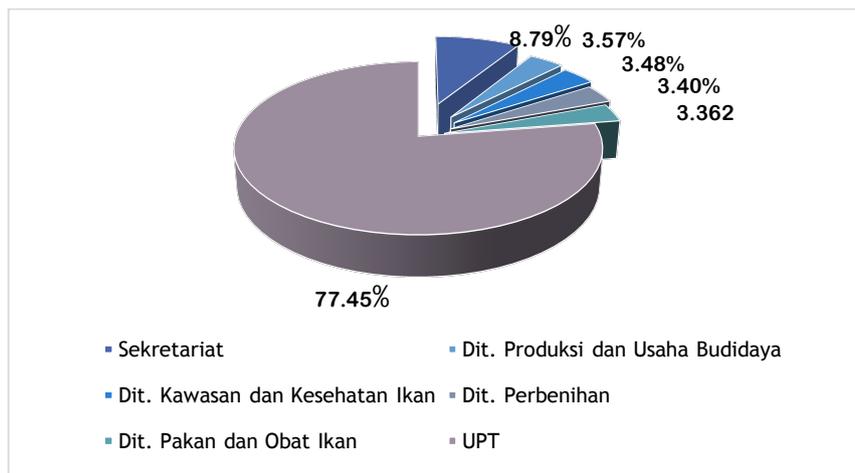
1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang



15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

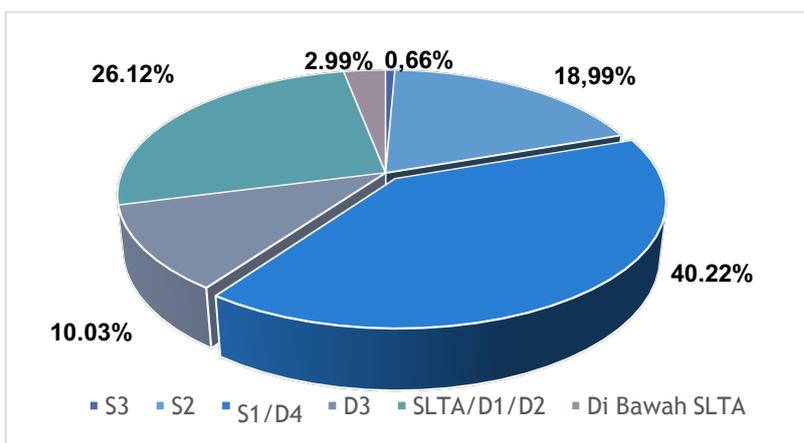
Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Tahun 2022 adalah 1.206 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 5 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 106 orang (8,79%); (ii) Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya sejumlah 43 orang (3,57%); (iii) Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan sejumlah 42 orang (3,48%); (iv) Direktorat Perbenihan sejumlah 41 orang (3,40%); (v) Direktorat Pakan dan Obat Ikan sejumlah 440 orang (3,32%); dan (vi) UPT sejumlah 934 orang (77,45%).



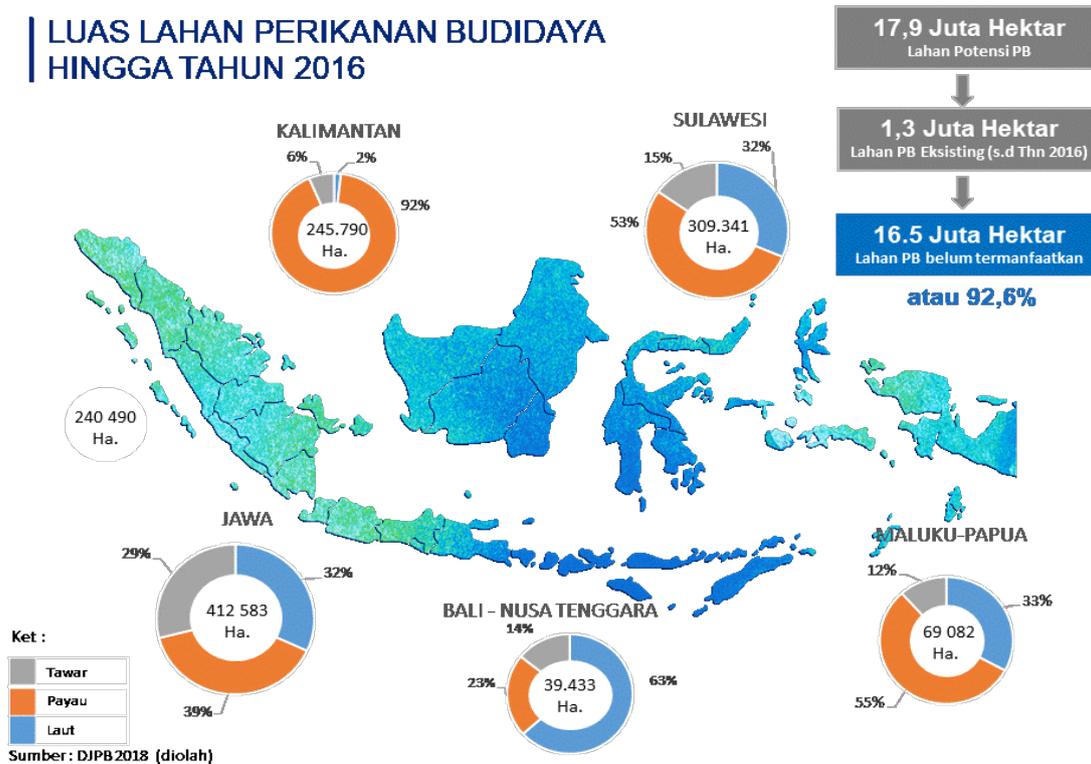
Gambar 2. Jumlah pegawai Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM DJPB adalah sebagai berikut : (i) S3 sejumlah 8 orang (0,66%); (ii) S2 sejumlah 229 orang (18,997%); (iii) S1/D4 sejumlah 485 orang (40,22%); (iv) D3 sejumlah 133 orang (11,03%); (v) SLTA/D1/D2 sejumlah 315 orang (26,12%); dan (vi) di bawah SLTA sejumlah 36 orang (2,99%).



Gambar 3. Jumlah pegawai Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan tingkat pendidikan

Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya



Gambar 4. Potensi Perikanan Budidaya

Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budidaya air payau 2,96 juta ha dan budidaya laut 12,12 juta ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budidaya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budidaya air tawar, 22,74 persen pada budidaya air payau dan 2,28 persen untuk budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budidaya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal.

Permasalahan internal yang dihadapi meliputi : (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan



oleh pelaku usaha perikanan budidaya; dan (vii) kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budidaya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budidaya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budidaya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budidaya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya selama tahun 2022.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2022, penetapan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja Tahun 2022. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “**Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan**” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan pembangunan perikanan budidaya adalah:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Ditjen Perikanan Budidaya, yakni meningkatkan kinerja.

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budidaya sebagai suatu outcome/impact dari beberapa



program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar 101 pada tahun 2020 dan 105 pada tahun 2024; dan
 - b. Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.450.000,- pada tahun 2020 dan Rp 3.700.000,- pada tahun 2024.
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat" dengan Indikator Kinerja: Nilai Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 19,14 Miliar di tahun 2020 dan Rp 23,77 Miliar di tahun 2024.
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah "Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan" dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya dengan target 4 pada tahun 2020 dan 5 pada tahun 2024;
 - b. Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budidaya berkelanjutan dengan target 10 kawasan pada tahun 2020 dan 50 kawasan pada tahun 2024;
 - c. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /startegis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan target 70 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024.
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Produksi Perikanan Budidaya sebesar 18,44 juta ton pada tahun 2020 dan 22,65 juta ton pada tahun 2024; dan
 - b. Produksi Ikan Hias sebesar 1,87 miliar ekor pada tahun 2020 dan 2,33 miliar ekor pada tahun 2024.
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif", dengan indikator pengujian residu produk perikanan budidaya yang partisipatif sebesar 13.630 paket pada tahun 2020 dan 30.730 paket pada tahun 2024; yang terdiri dari :
 - a. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan 500 paket pada tahun 2020 dan 500 paket pada tahun 2024
 - b. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan 10.000 paket pada tahun 2020 dan 26.000 paket pada tahun 2024
 - c. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang produksi dan usaha 3.000 paket pada tahun 2020 dan 4.000 paket pada tahun 2024
 - d. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang pakan dan obat ikan 130 paket pada tahun 2020 dan 230 paket pada tahun 2024
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya", dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai PM PRB DJB dengan nilai 34 di tahun 2020 dan 36 pada tahun 2024
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebesar 72 di tahun 2020 dan 76 pada tahun 2024
 - c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi sebesar 6 unit kerja pada tahun 2020 dan 10 unit kerja pada tahun 2024



- d. Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan nilai realisasi anggaran sebesar ≤ 1 pada tahun 2020 – 2024
- e. Nilai PM SAKIP DJPB sengan nilai 85 pada tahun 2020 dan 86,75 pada tahun 2024
- f. Tingkat Maturitas SPIP level 3 pada tahun 2020 – 2024
- g. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya 60 persen pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2024
- h. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar 82 persen pada tahun 2020 dan 90 persen pada tahun 2024
- i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik 1 unit pada tahun 2020 – 2024
- j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budidaya 88 pada tahun 2020 dan 90 pada tahun 2024
- k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan nilai 85 tahun 2020 dan 89 pada tahun 2024.

Penetapan Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan suatu proses evaluasi yang secara berkesinambungan dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan sistem perencanaan pada tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) 2020-2024 tidak luput dari proses evaluasi, dimana Renstra tersebut mengalami evaluasi untuk menanggapi perubahan kondisi lingkungan strategis aktual yang terjadi di lingkup nasional, kementerian, atau sub-sektor perikanan budidaya itu sendiri. Proses evaluasi perencanaan tersebut dilakukan pada tahun 2021 ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 - 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020. Menindaklanjuti Renstra KKP tersebut, DJPB telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 272/PER-DJPB/2020. Kemudian dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang digagas oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas yang dimulai pada RABPN 2021 mengakibatkan perlunya penyesuaian pada nomenklatur output Program Pengelolaan Perikanan Budidaya menjadi Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan dan juga penggunaan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada setiap level kegiatan.

Selain itu, arah kebijakan pada Renstra 2020-2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dimulai tahun 2021. Guna mendukung peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan (Program



Prioritas 4) yang merupakan bagian dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan (Prioritas Nasional 1), KKP menetapkan 3 (tiga) program terobosan, dimana 2 (dua) program terobosan tersebut berkaitan dengan perikanan budidaya yaitu (1) pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas yang berorientasi ekspor serta (2) pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Penyesuaian kebijakan tersebut direncanakan akan dibarengi dengan penyesuaian struktur organisasi eselon I lingkup KKP. Namun sampai saat ini penyesuaian organisasi masih dalam tahap persetujuan oleh pihak berwenang. Sehingga penyesuaian Renstra KKP yang akan menjadi rujukan Renstra Ditjen Perikanan Budidaya sampai saat ini belum dapat ditetapkan.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2021 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 116 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022, termasuk di dalamnya Rencana Kerja Ditjen Perikanan Budidaya. Dalam dokumen Rencana Kerja 2022 tersebut terdapat perubahan atas beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target dibanding dengan dokumen Renstra. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian menindaklanjuti kebijakan KKP dan tindak lanjut dari hasil Evaluasi MENPAN terhadap SAKIP DJPB 2021. Adapun Target Indikator yang berbeda itu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Keselarasan target IKU Pada Renstra 2020-2024 dan PK 2022

IK		RENSTRA	PK	KETERANGAN
IK-2	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya	3.550.000	5.000.000	Adanya arahan dari pimpinan pada saat rapat para pimpinan Eselon 1 bersama MKP, Menteri Kelautan dan Perikanan meminta target Pendapatan pembudidaya menjadi 5 juta per bulan. Pertimbangan dinaikkan target IKU ini dikarenakan di tahun sebelumnya capaian rata rata pendapatan pembudidaya mencapai diatas empat juta rupiah.
	Tingkat Kemandirian pulau pulau kecil terluar	4	0	Tahun 2022 sesuai dengan arahan dari pimpinan (MKP) untuk kegiatan kemandirian SKPT tidak di laksanakan lagi di Ditjen Perikanan Budidaya karena tidak sesuai dengan tulsinya.
IK-3	Kawasan Perikanan Budidaya yang berkelanjutan	30	130	Perbendaan ini terjadi karena adanya arahan pimpinan (MKP) sebagai program trobosan KKP untuk pengembagan kampung kampung perikanan budidaya
Ik.5	Poduksi Perikanan Budidaya (juta ton)	20,5	18,77	Hasil rapat pimpinan KKP, di sepakati target produksi perikanan budidaya turun menjadi 18,77 juta ton dikarenakan hasil evaluasi capaian produksi perikanan budidaya di tahun tahun sebelumnya tidak pernah mencapai target.
IK-6	Produksi Ikan Hias (Milyar ekor)	2,1	1,56	Hasil rapat pimpinan KKP, di sepakati target produksi iakn hias diturunkan menjadi 1,56 milyar ekor, dikarenakan hasil evaluasi capaian produksi ikan hias di tahun tahun sebelumnya tidak pernah mecapai target
Ik-7	Tenga Kerja yang terlibat	-	23.348	Arahan dari MKP yang meminta setiap Eselon 1 menghitung berapa tenaga kerja yang terlibat sebagai outcome dari program prioritas KKP. Pada PK awal



IK	RENSTRA	PK	KETERANGAN
			ditargetkan 32.025 orang, tetapi karena adanya Auto ajustment maka pada PK revisi bulan desember target tenaga kerja turun menjadi 23.348 orang
IK-8	21.937	-	Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sakisip oleh Menpan tahun 2021 yang menyampaikan bahwa IKU pengujian residu dianggap bukan outcome tapi masih proses
IK-8	-	97	
			Berubah menjadi Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sample bebas residu) (%)
IK.9	74	80	Capaian IP ASN tahun 2020 sudah mencapai 81
IK-12	8	9	Capaian Tahun 2021 Unit Kerja yang ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi sudah mencapai 8, atas arahan setjen dimana jika target indikator kinerja tahun berjalan sudah dicapai pada tahun sebelumnya maka dinaikkan saja targetnya, karena asumsinya tidak ada upaya pun sudah tercapai
IK 18	75	75	Kesepakatan eselon 1 pada saat rapat kinerja KKP IKU ini yang awalnya masuk ke sasaran program Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan menjadi ke Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
IK, 21	-	75	penambahan IKU baru berdasarkan Nota Dinas dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor 4.11/ITj.0/R.C.610/II/2021 tanggal 11 Januari Tahun 2021
IK.22	-	75	
			Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2022 telah terjadi revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Desember yang diakibatkan dari adanya kebijakan Automatic Adjustment (AA) anggaran yang mengakibatkan perubahan target. (PK awal dan Revisi terlampir pada lampiran 1)

Iktisar eksekutif Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 hasil revisi diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103
		2.	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000
2.	Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat	3.	Nilai PNBPN dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	21
3.	Kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4.	Sentra Kawasan Budidaya (Kawasan)	130
4.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	5.	Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	18,77
		6.	Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,56
		7.	Tenaga kerja yang terlibat (orang)	23.348
5.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8.	Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	9.	Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	33
		10.	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	80
		11.	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) (Unit)	9
		12.	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 (%)	≤1
		13.	Nilai PM SAKIP DJPB (Nilai)	80,01
		14.	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3
		15.	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	70
		16.	Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86
		17.	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	1
		18.	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	75
19.	Nilai IKPA DJPB (Nilai)	89		
20.	NKA lingkup DJPB (Nilai)	86		



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPB (Nilai)	75
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPB (Nilai)	75

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU

- a) Angka maksimum adalah 120;
- b) Angka minimum adalah 0;
- c) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
 - a. Polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$

 - b. Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$

 - c. Polarisasi Stabilize
Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.



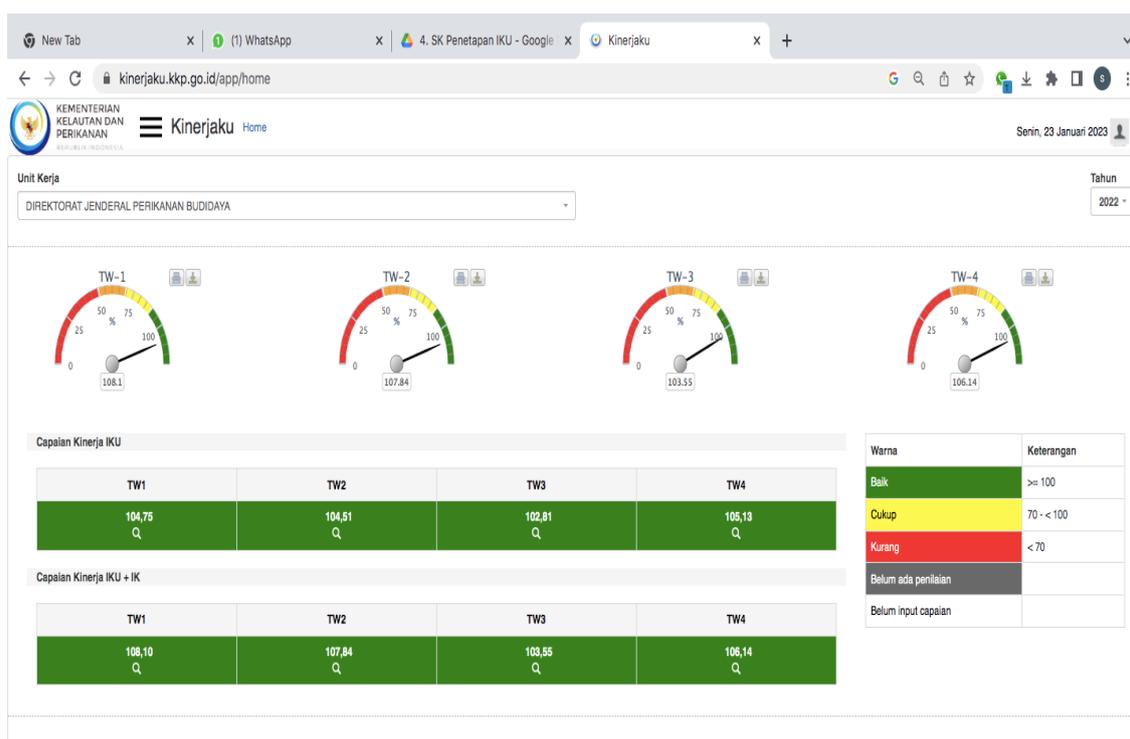
Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2022 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budidaya menitikberatkan pada enam Sasaran Strategis dengan dua puluh dua Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Capaian Kinerja Ditjen perikanan Budidaya Tahun 2022 sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,14 %. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan NPSS tahun 2021 yang besarnya mencapai 105,07%. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pencapaian sasaran.

Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 tergambar pada Dashboard aplikasi Kinerjaku di bawah ini.



Gambar 5. Dashboard capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	% Aplikasi Kinerjau
1	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103,00	104,62	101,57	101,57
2	Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000	4.842.192	96,84	96,84



INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	% Aplikasi Kinerja
3	Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	21	27,93	133	120
4	Sentra Kawasan Perikanan Budidaya	130	130	100	100
5	produksi Perikanan Budidaya (juta ton)	18,77	16,89	89,98	89,98
6	produksi ikan hias (miliar ekor)	1,56	1,66	106,41	106,41
7	Tenaga kerja terlibat	23.348	45.903	196,60	120
8	Prosentase jumlah sampe residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97	99,89	102,98	102,98
9	Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	33	34,03	103,12	103,12
10	Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	80	83,35	104,19	104,19
11	Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	11	122,22	120
12	Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2019 (%)	≤1	0,03	120	120
13	Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)	80,01	80,03	100,20	100,20
14	Tingkat Maturitas SPIP (Level)	3	3,81	127	120
15	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	70	94,52	135,03	120
16	Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86	100	116,28	116,28
17	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public	1	2	200	120
18	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/startegis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	76	86,15	114,87	114,87
19	Nilai IKPA DJPB	89	92,56	104,00	104,00
20	Nilai Kinerja Anggaran DJPB	86	89,44	104,19	104,19
21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang dan Jasa	75	76,06	101,41	101,41
22	Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN	75	77,50	103,33	103,33

Analisa Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SS.1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya merupakan tujuan dari program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sasaran ini memiliki dua Indikator Kinerja, yaitu:

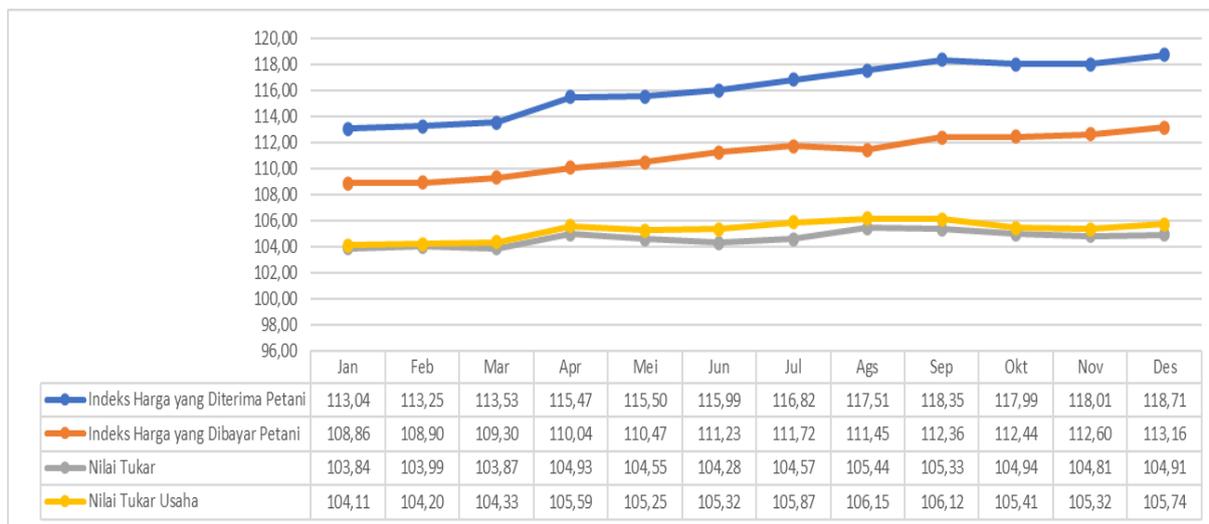


IK.1 Nilai Tukar pembudidaya ikan (NTPI)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
99,08	100,80	100,98	100,55	102,83	103	104,62	101,57	105	99,64

*sumber data BPS

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) adalah salah satu indikator kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya usaha budidayanya. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) merupakan angka indek antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi.



Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2022

Pada bulan Januari - Desember tahun 2022 secara rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar 104,62. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan tahun 2022 berada di atas 100. Sementara Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) rata-rata tahun 2022 sebesar 105,28 menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian karena nilai indeksnya di atas 100. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai Tukar Pembudidaya Ikan naik selama tahun 2022 dan berada pada puncaknya di bulan Agustus. Sejalan dengan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan juga terus naik selama tahun 2022 dan berada pada puncaknya pada bulan Agustus.



Tabel 4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2020

Komponen NTPi	Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
Nilai Tukar	103,84	103,99	103,87	104,93	104,55	104,28	104,57	105,44	105,33	104,94	104,81	104,91	104,62	0,09
Nilai Tukar Usaha	104,11	104,20	104,33	105,59	105,25	105,32	105,87	106,15	106,12	105,41	105,32	105,74	105,28	0,14
a Indeks Harga Diterima (It)	113,04	113,25	113,53	115,47	115,50	115,99	116,82	117,51	118,35	117,99	118,01	118,71	116,18	0,45
Budidaya air tawar	106,54	106,42	106,07	108,04	108,65	109,66	110,15	110,07	111,77	111,74	111,79	112,87	109,48	0,53
Budidaya laut	115,85	116,00	115,36	117,85	118,54	119,16	120,85	120,71	119,66	119,15	118,08	119,29	118,38	0,27
Budidaya Air Payau	114,23	114,08	114,34	115,40	114,69	114,27	114,95	116,21	117,61	116,85	117,77	117,89	115,69	0,29
b Indeks harga Dibayar	108,86	108,90	109,30	110,04	110,47	111,23	111,72	111,45	112,36	112,44	112,60	113,16	111,04	0,35
Indeks KRT	109,17	109,16	109,85	110,85	111,36	112,55	113,34	112,30	113,40	113,07	113,29	114,29	111,89	0,42
Indeks BPPBM	108,57	108,69	108,82	109,35	109,74	110,14	110,35	110,70	111,53	111,93	112,05	112,27	110,35	0,31

Jika dilihat dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa selama tahun 2022 indeks harga diterima mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,45 persen dengan rata-rata indeks harga diterima (It) sebesar 116,18. Dari komponen penyusun It, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa indeks harga ikan seluruhnya mengalami kenaikan harga dengan kenaikan harga tertinggi pada budidaya ikan air tawar sebesar 0,53 persen sementara budidaya laut dan budidaya air payau masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,29 persen. Meningkatnya indeks harga ikan dimungkinkan semakin membaiknya tingkat permintaan ikan baik ekspor maupun pasar dalam negeri.

Tabel 5. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2022

Komponen NTPi	Bulan												Rata-rata	Kenaikan rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
Konsumsi Rumah Tangga	109,17	109,16	109,85	110,85	111,36	112,55	113,34	112,30	113,40	113,07	113,29	114,29	111,89	0,42
1 Makanan, Minuman dan Tembakau	110,47	110,34	111,39	112,41	113,19	115,18	116,37	114,28	114,62	113,81	114,09	115,75	113,49	0,43
2 Pakaian dan alas kaki	112,57	112,72	113,03	114,30	114,56	114,85	115,27	115,51	115,89	116,05	116,22	116,45	114,78	0,31
3 Perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga	104,61	104,76	105,14	105,53	105,71	105,86	106,29	106,53	106,87	107,10	107,21	107,33	106,08	0,23
4 Perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin RT	110,46	110,75	111,05	111,50	111,77	112,07	112,34	112,68	113,21	113,49	113,65	113,95	112,25	0,28
5 Kesehatan	110,08	110,25	110,63	110,88	111,03	111,29	111,50	111,73	112,05	112,21	112,40	112,63	111,39	0,21
6 Transportasi	105,52	105,65	105,83	108,46	108,61	108,76	108,96	109,21	116,91	117,48	117,64	117,94	110,91	1,04
7 Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	104,31	104,23	104,25	104,25	104,24	104,33	104,32	104,35	104,31	104,35	104,37	104,39	104,31	0,01
8 Rekreasi, olahraga, dan budaya	109,68	109,85	109,98	110,06	110,28	110,50	111,17	111,31	111,56	111,70	111,84	111,92	110,82	0,18
9 Pendidikan	103,47	103,66	103,66	103,66	103,66	103,66	103,83	103,89	104,02	104,03	104,03	104,03	103,80	0,05
10 Penyediaan makanan dan minuman/restoran	108,13	108,28	108,49	108,87	109,23	109,51	109,84	110,12	110,46	110,71	110,97	111,17	109,65	0,25
11 Perawatan pribadi dan jasa Lainnya	112,36	112,58	113,00	113,39	113,70	114,05	114,36	114,70	115,12	115,26	115,47	115,84	114,15	0,28



Komponen penyusun Ib yang terdiri dari indeks konsumsi rumah tangga (KRT) dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM), masing-masing indeks rata-rata selama tahun 2022 sebesar 111,89 dan 110,35 dengan kenaikan rata-rata masing-masing sebesar 0,42 persen per bulan dan 0,31 persen per bulan. Naiknya indeks harga dibayarkan oleh pembudidaya ini diakibatkan oleh adanya desakan inflasi

Selama periode Januari - Desember tahun 2022, indeks konsumsi rumah tangga tertinggi secara rata-rata adalah Pakaian dan Alas Kaki (114,78), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (114,15), serta Makanan, Minuman dan Tembakau (113,49). Namun jika dilihat dari kenaikan rata-rata per bulannya maka kenaikan rata-rata indeks transportasi yang tertinggi (1,04%), Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga membuat indeks harga transportasi naik.

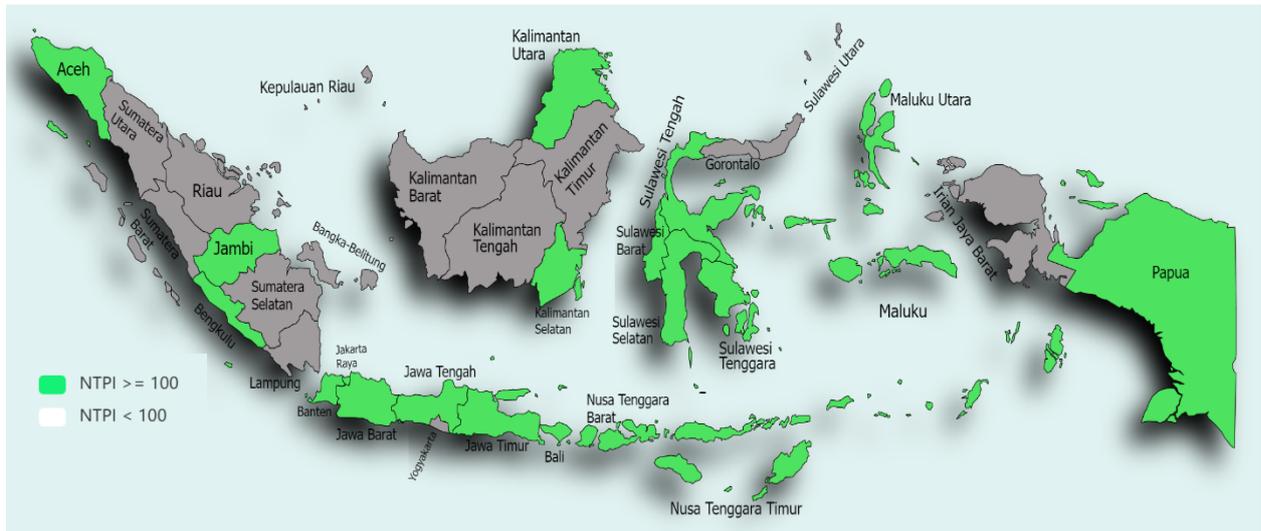
Berdasarkan komponennya selama periode Januari – Desember, Indeks BPPBM dengan kenaikan rata-rata tertinggi berturut-turut adalah transportasi, pupuk, obat-obatan dan pakan ikan, dan upah buruh, dengan kenaikan rata-rata per bulan masing-masing sebesar 1,32 persen, 0,35 persen dan 0,21 persen. Kenaikan indeks harga transportasi disebabkan naiknya harga bahan bakar minyak sehingga berpengaruh pada indeks harga transportasi, Naiknya indeks Pupuk, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan selain disebabkan kenaikan inflasi, juga dimungkinkan karena masih tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memengaruhi harga tepung ikan dan secara langsung memengaruhi harga pakan ikan, sementara upah buruh mengalami kenaikan dimungkinkan karena naiknya upah minimum regional dan kondisi bencana nasional saat ini sehingga sulit mencari buruh.

Tabel 6. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2020

Komponen NTPI	Indeks Harga												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
BPPBM	108,57	108,69	108,82	109,35	109,74	110,14	110,35	110,70	111,53	111,93	112,05	112,27	110,35	0,31
1 Bibit/Benih	110,65	110,66	110,56	110,98	111,24	111,20	111,41	112,17	112,31	112,77	112,58	112,74	111,61	0,17
2 Pupuk, obat-obatan, dan pakan ikan	109,98	110,12	110,32	110,92	111,51	112,18	112,40	112,66	113,42	113,77	114,04	114,24	112,13	0,35
3 Sewa dan pengeluaran lainnya	103,34	103,36	103,37	103,64	103,67	103,77	103,79	103,82	104,01	104,06	104,10	104,15	103,76	0,07
4 Transportasi dan komunikasi	104,78	104,85	104,93	107,45	108,25	108,69	108,91	109,11	119,58	120,11	120,51	120,60	111,48	1,32
5 Barang modal	104,83	104,83	105,04	105,34	105,40	105,46	105,59	105,71	105,92	106,18	106,37	106,47	105,60	0,14
6 Upah buruh	107,02	107,53	107,78	107,95	108,13	108,32	108,45	108,59	108,73	109,20	109,25	109,54	108,37	0,21

Berdasarkan wilayahnya selama periode Januari – Desember tahun 2022 terdapat 20 provinsi yang rata-rata indeks NTPI-nya di atas 100, yaitu Aceh, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. NTPI rata-rata tertinggi pada Januari - September ini adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai sebesar 117,46 dan NTPI terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 91,45.





Gambar 7. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2022

Sementara indeks Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPI) selama periode Januari - Desember tahun 2022, jumlah provinsi yang memiliki NTUPI diatas 100 relatif stabil. Secara rata-rata pada periode Januari - Desember terdapat 23 provinsi yang NTUPI-nya di atas 100 yaitu Aceh, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. NTPI rata-rata tertinggi pada Januari - Desember ini adalah provinsi Maluku dengan nilai sebesar 120,02 dan NTPI terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 91,47. Berikut peta sebarannya:



Gambar 8. Peta Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2022

Dari gambar NTPI dan NTUPI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perbaikan harga di tingkat pembudidaya ikan. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah provinsi yang NTPI dan NTUPI-nya naik dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya jumlah provinsi yang NTPI dan NTUPI-nya di atas 100 berjumlah masing-masing 18 provinsi dan 20 Provinsi.

Dalam kondisi saat ini yang dapat dilakukan guna menjaga indeks NTPI dan NTUPI adalah menjaga produktivitas pembudidaya sekaligus menjaga harga komoditas di tingkat pembudidaya tidak turun atau bahkan bisa naik dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Bibit/benih dan pakan adalah dua komponen ini yang cukup berpengaruh dan dapat diintervensi oleh Ditjen Perikanan Budidaya. Oleh karenanya kebijakan terkait bibit/benih dan pakan dapat dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha pembudidaya. Selain itu, sistem pendistribusian hasil produksi, baik benih maupun ikan konsumsi juga mesti diperhatikan saat ini karena saat ini sistem transportasi menjadi kendala.

IKU.2 . Rata-rata pendapatan pembudidaya

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
3.298.751	3.385.947	3.621.343	3.544.245	4.412.001	5.000.000	4.842.187	96,84	3.700.000	130,87

*sumber data :KKP

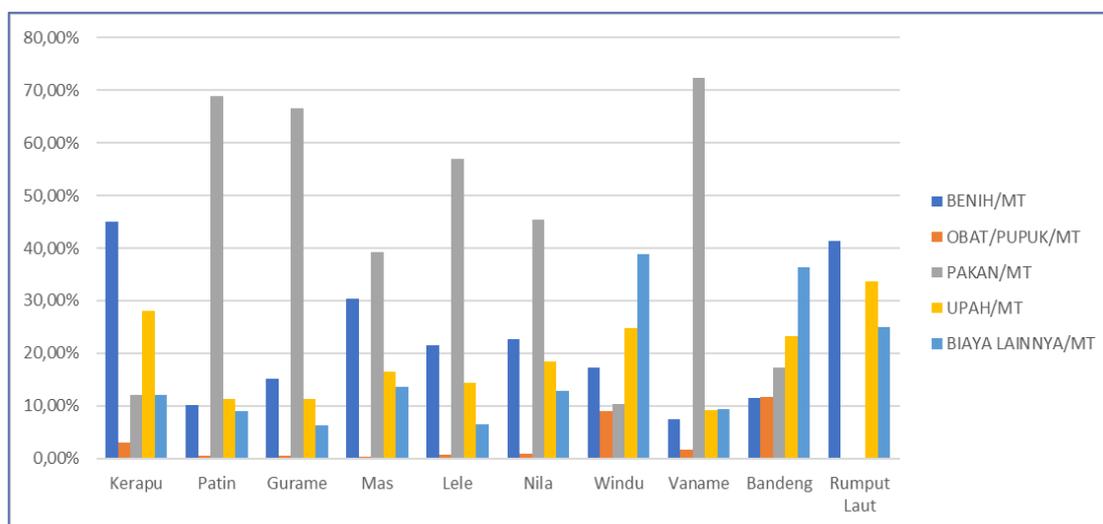
Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun, sementara itu terkait dengan pendapatan pembudidaya adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan membudidayakan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan pembudidayaan ikan dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya.

Peningkatan pendapatan pembudidaya merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan perikanan budidaya oleh karena itu rencana aksi yang dilakukan dalam setiap pencapaian IKU secara tidak langsung juga merupakan rencana aksi dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya. Pendapatan pembudidaya ikan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga ikan, termasuk rumput laut, harga rumput laut kering dan kondisi pandemic covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan triwulan 4 tahun 2022, masih menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan pembudidaya ikan, dibandingkan dengan tahun 2021 pendapatan pembudidaya mengalami peningkatan sebesar 11,90%, peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan harga beberapa komoditas perikanan budidaya seperti bandeng, kerapu dan patin yang banyak dikonsumsi dalam negeri, harga ikan merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, harga ikan untuk beberapa jenis ikan diindikasikan dapat menyebabkan inflasi untuk ikan hasil budidaya, ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang harganya dapat menyebabkan inflasi menurut BPS. Harga ikan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti musim, waktu panen, harga sarana produksi pembudidayaan ikan dan preferensi konsumsi masyarakat, oleh karena itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk menstabilkan harga ikan di masyarakat, tidak terbatas hanya pada bantuan pemerintah saja tapi bisa juga dengan berbagai penguatan kelembagaan ataupun dengan promosi yang terus menerus.

Secara garis besar (gambar 9) biaya yang paling banyak digunakan sebagai biaya input pembudidayaan ikan adalah pakan rata-rata diatas 60 % kecuali untuk ikan kerapu dan udang windu, biaya pakan untuk ikan kerapu cenderung kecil karena pembudidaya kerapu



masih bergantung pada ikan rucah sebagai pakan ikan kerapu sedangkan untuk ikan untuk udang windu yang rata-rata cara budidayanya masih tradisional, secara umum kondisi persentase penggunaan biaya operasional untuk budidaya ikan masih sama dengan triwulan 2 tahun 2022.



Gambar 9. Struktur Biaya Operasional Pembudidayaan Ikan Beberapa Komoditas Utama

SS.2. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat

IK.3 Nilai PNBP dari Perikanan Budidaya

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
18,58	21,23	19,83	23,49	24,34	21	27,93	137,80	23,77	117,51

*Satuan milyar rupiah

Capaian PNBP DJPB diperoleh dari jumlah Pendapatan Fungsional dan Umum Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT DJPB periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Desember 2022. Realisasi PNBP s.d. 30 Desember 2022 sebesar Rp27.933.199.184,- atau 137,80% dari target PNBP sebesar Rp21.000.000.000,- dan mengalami kenaikan sebesar 14,76% dibanding realisasi tahun 2021 pada periode yang sama sebesar Rp.24.340.899.131,- .

PNBP lainnya berupa jenis PNBP pelayanan s.d 30 Desember 2022 Rp27.933.199.184,- meningkat signifikan sebesar 14,76% jika dibandingkan dengan tahun 2021 pada periode yang sama sebesar Rp.24.340.899.131,- meliputi pendapatan atas:

- hasil samping kegiatan pembudidayaan ikan;
- pemeriksaan/pengujian laboratorium;
- pekerjaan dan informasi;
- hasil penjualan hasil produksi non litbang lainnya;
- penggunaan sarana prasarana sesuai tugas dan fungsi; dan
- jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021.



PNBP lainnya berupa jenis PNBP pelayanan s.d 30 Desember 2022 didominasi dari Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) sebesar Rp19.420.040.982,00,- dikarenakan jenis penerimaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya (425112) berupa proses produksi udang diakhir tahun 2021 yang dipanen pada bulan Januari dan Februari tahun 2022 pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, selain itu juga ada:

- a. Pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan (425421) sebesar Rp5.260.000,00,- berupa layanan pelatihan tingkat dasar bidang pengendalian hama penyakit ikan dan identifikasi penyakit ikan di BPBAP Situbondo dan BPKIL Serang;
- b. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi (425692) sebesar Rp28.500.000,00,- berupa bimtek bidang pembudidayaan Ikan Magang Tentang Pemijahan dll di BBPBAT Sukabumi;
- c. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya (425289) sebesar Rp5.557.090.000,00,- berupa pelayanan Laboratorium; dan
- d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp808.496.000,00,- berupa sewa asrama/mess di beberapa UPT seperti BBPBAP Jepara, BPBAP Takalar, LP2IL Serang, BPBAP Ujung Batee. BPBAT Tatelu , BBPAT Sukabumi, BPIU2K Karang Asem dan BLUPPB Karawang.

PNBP lainnya berupa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) s.d 30 Desember 2022 sebesar Rp 2.113.812.202,- berupa sewa BMN atas rumah dinas, pendapatan penjualan BMN berupa :

- 1) Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp1.356.568.314,00 berasal dari: BPBAP Takalar sebesar Rp53.700.000,- dari lelang BMN berupa AC, Lemari Es, alat laboratorium, peralatan dan mesin dan investaris kantor lainnya dengan kondisi rusak berat pada Kantor BPBAP Takalar dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dari Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp683.777.899,-
- 2) Pendapatan pemindahtanganan BMN Lainnya (425129) sebesar Rp21.212.212,- berupa lelang barang bergerak satu paket barang inventaris kantor dengan kondisi berat pada BBPBL Lampung sesuai ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 3) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp736.031.676,00,- berupa sewa rumah dinas dan sewa lahan oleh koperasi untuk kerjasama budidaya ikan dan udang;
- 4) Penerimaan non anggaran (hak negara lainnya) s.d 30 Desember 2022 sebesar Rp Rp1.379.501.886,-, pendapatan non anggaran berlaku umum di seluruh Kementerian/Lembaga berupa :

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Non Bendahara (425791) dari Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang atas TGR kehilangan Aset BMN berupa 18 unit pengolah data karena insiden pencurian dengan total jumlah kerugian sebesar Rp41.477.670,-;

1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp140.110.289,- berasal dari :
 - a. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam sebesar Rp31.397.620,- atas:
 - ✓ Pengadaan bahan baku pakan ikan sebesar Rp14.433.000,-;
 - ✓ pengadaan bahan lab kualitas air sebesar Rp2.480.620.-;



- ✓ pengadaan prasarana bioflok tahap II lokasi provinsi Lampung sebesar Rp294.000,-;
 - ✓ pengadaan prasarana bioflok paket III lokasi lokasi Sumatera Selatan sebesar Rp14.190.000,-;
- b. Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya (Direktorat Benih, POI dan Produs) sebesar Rp57.141.372,- atas:
- ✓ Jasa Konsultansi Review Masterplan Kampung Perikanan Budidaya Pasaman sebesar Rp4.560.000,-;
 - ✓ Pengadaan Jasa Konsultansi UKL/UPL Pembangunan Unit Produksi Pakan Mandiri Skala Medium di Kampung Budidaya Ikan Mas Kabupaten Pasaman sebesar Rp2.067.764,-;
 - ✓ Pengadaan paket bantuan sarana produksi lobster di kampung perikanan budidaya Kab. Lombok Timur sebesar Rp9.604.951,-;
 - ✓ Pembangunan Kolam Pedederan di Kab OKU Timur sebesar Rp8.320.406,-;
 - ✓ Rehab Sarpras UPR di Kab OKU Timur sebesar Rp8.348.774,-;
 - ✓ Penyusunan Masterplan Kampung Perikanan Budidaya Kab.Lombok Timur sebesar Rp3.661.391,-;
 - ✓ Penyusunan Masterplan Kampung Perikanan Budidaya Kab. Kupang sebesar Rp4.354.086,-;
 - ✓ Bantuan Benih Bening Lobster di Kabupaten Lombok Timur Rp16.224.000,-.
- c. BBPBAP Jepara sebesar Rp 5.485.000 terkait Keterlambatan penyelesaian pekerjaan berupa Pengadaan bahan bantuan untuk operasional budidaya bioflok tahap 1;
- d. BBPBAT Sukabumi sebesar Rp 14.232.187 terkait Keterlambatan penyelesaian pekerjaan berupa pengadaan paket bantuan bioflok di Manokwari Selatan.

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp77.449.512,- berupa smp denda dimana Aplikasi Sakti langsung menggunakan akun 425911 ini.

Upaya peningkatan capaian PNBP perikanan budidaya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan
 - a. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan terintegrasi dan berkelanjutan
 - b. Pengembangan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan
 - c. Optimalisasi pengawalan dan aplikasi teknologi terapan perikanan budidaya
 - d. Penguatan sarana prasarana UPT DJPB
2. Peningkatan Produksi
 - a. Akselerasi peningkatan produksi akuakultur melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
 - b. Pengembangan komoditas ekonomis penting untuk konsumsi domestik dan ekspor
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perbenihan
 - d. Optimalisasi sarana produksi seperti hatchery, tambak dan karamba jaring apung (KJA).
3. Peningkatan Kesejahteraan
 - a. Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan
 - b. Pendampingan teknis pembudidaya ikan
 - c. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha
4. Integrasi Lintas Sektor
 - a. Mengusulkan Revisi PP 85 Tahun 2021 dengan penambahan layanan, komoditas dan penyederhanaan tarif guna pengembangan produksi perikanan
 - b. Pengelolaan dan alokasi PNBP secara tepat guna dan efisien.



Anggaran untuk pengelolaan PNB sebesar Rp177.000.000 untuk kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kinerja PNB DJPB KKP dan sudah terealisasi sebesar Rp.177.000.000 atau 100% untuk kegiatan perjalanan dinas.

SS.3. Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan

IKU 4. Sentra Kawasan Budidaya

207	Realisasi 2017-2021				2022			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	7	10	130	130	100	50	260

*2017-2019 IKU sentra kawasan belum ada

** tahun 2020-2021 yang dimaksud sentra kawasan budidaya merujuk pada kawasan tambak

Program terobosan pembangunan kampung perikanan budidaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2021, merupakan kawasan perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan dan/atau komoditas lokal yang mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya usaha pembudidayaan ikan yang berdaya saing dan berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta masyarakat sebagai penggerak utama. Kampung Perikanan Budidaya (KPB) ini melibatkan berbagai aspek dari hulu, on farm hingga hilir yakni pengolahan dan pemasaran dengan tujuan menjamin produksi yang berkelanjutan dan terjadwal.

Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 130 lokasi KPB yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2021 di 6 (enam) lokasi dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 di 124 (seratus dua puluh empat) lokasi. Dukungan kegiatan pada pembangunan kampung perikanan budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya telah memberikan bantuan benih, bantuan induk, bantuan mesin pakan mandiri, bantuan bioflok, bantuan UPR, sertifikasi perikanan budidaya (CBIB dan CPIB), bantuan premi asuransi, prasertifikasi hak atas tanah, pos pelayanan kesehatan ikan terpadu, PITAP, bantuan sarana dan prasarana budidaya, bimbingan teknis dan penyuluhan. Bantuan pemerintah di 130 lokasi KPB dapat di lihat pada Tabel di bawah berikut:

Tabel 7. Bantuan Pemerintah di 130 (Seratus Tiga Puluh) Kampung Perikanan Budidaya

No	Provinsi	Kab/Kota	Komoditas	Jenis Bantuan
1	Aceh	Aceh Selatan	Nila Salin	Benih Nila
2	Aceh	Tamiang	Udang Windu	Benih, Pompa Air
3	Aceh	Aceh Tenggara	Mas	Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri
4	Aceh	Bireun	Bandeng	Pompa Air
5	Aceh	Simeulue	Lobster	SK Penetapan Kampung Lobster
6	Sumut	Binjai	Lele	Pompa Air
7	Sumut	Deli Serdang	Mas	Roda Tiga, Mesin Pakan Mandiri
8	Sumut	Karo	Mas	Roda Tiga, Mesin Pakan Mandiri
9	Sumut	Langkat	Kepiting	Roda Tiga
10	Sumut	Tapanuli Tengah	Nila	Pompa Air
11	Sumut	Batubara	Kerapu	SK Penetapan Kampung Kerapu
12	Sumbar	Agam	Nila	Mesin Pakan Mandiri
13	Sumbar	Kota Pariaman	Lele	Mesin Pakan Mandiri
14	Sumbar	Limapuluh Kota	Gurami	Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri



No	Provinsi	Kab/Kota	Komoditas	Jenis Bantuan
15	Sumbar	Pasaman	Mas	Mesin UPPI, Forklift, Pompa Air, Roda Tiga, Saprass UPR, Benih, Calon Induk
16	Sumbar	Padang Pariaman	Gurami	Pompa Air
17	Sumsel	Kota Palembang	Lele	Pompa Air, Benih, Calon Induk
18	Sumsel	Banyu Asin	Patin	Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri
19	Sumsel	Kota Prabumulih	Lele	Pompa Air, Calon Induk
20	Sumsel	Oku Timur	Patin	Mesin UPPI, Excavator, Pompa Air, Benih
21	Sumsel	Musi Rawas	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
22	Kep Bangka	Belitung Timur	Kerapu	SK Penetapan Kampung Kerapu
23	Jambi	Muora Jambi	Patin	SK Penetapan Kampung Patin
24	Bengkulu	Bengkulu Utara	Nila	Pompa Air
25	Bengkulu	Kepahiang	Nila	Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri
26	Bengkulu	Kota Bengkulu	Lele	Pompa Air
27	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Patin	Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri
28	Lampung	Lampung Selatan	Rumput Laut	Mesin Ketinting, KBRLL
29	Lampung	Pringsewu	Nila	Roda Tiga, Mesin Pakan Mandiri
30	Lampung	Pesawaran	Bawal Bintang	Mesin Pakan Mandiri, Benih
31	Lampung	Lampung Barat	Nila	SK Penetapan Kampung patin
32	Riau	Kampar	Patin	Pompa Air, Roda 3, Calon Induk
33	Riau	Meranti	Kakap	Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri, Saprass UPR, Benih
34	Kepri	Bintan	Bawal Bintang	Roda Tiga, Benih
35	Kepri	Kep Anambas	Kerapu	Benih
36	Kepri	Kota Batam	Kakap	Benih
37	Kepri	Bintan	Bawal Bintang	SK Penetapan Kampung Bawal Bintang
38	Kepri	Lingga	Rumput Laut	SK Penetapan Kampung Bawal Bintang
39	Jakarta	Kepulauan Seribu	Kerapu	Benih
40	Banten	Lebak	Patin	SK Penetapan Kampung Patin
41	Banten	Pandeglang	Lobster	SK Penetapan Kampung Lobster
42	Jabar	Garut	Mas	Calon Induk
43	Jabar	Indramayu	Nila Salin	Roda Tiga
44	Jabar	Karawang	Nila Salin	Mesin Pakan Mandiri, Benih
45	Jabar	Purwakarta	Nila	Pompa Air, Benih
46	Jabar	Subang	Mas	Roda Tiga
47	Jabar	Sukabumi	Nila	Calon Induk
48	Jabar	Tasikmalaya	Nila	Calon Induk
49	Jabar	Bogor	Ikan Hias	SK Penetapan Kampung Ikan Hias
50	Jabar	Ciamis	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
51	Jabar	Cianjur	Lele	SK Penetapan Kampung Lele
52	Jabar	Kota Depok	Ikan Hias	SK Penetapan Kampung Ikan Hias
53	Jateng	Banyumas	Gurami	Benih
54	Jateng	Boyolali	Lele	Pompa, Roda Tiga
55	Jateng	Cilacap	Sidat	Mesin Pakan Mandiri
56	Jateng	Demak	Lele	Mesin Pakan Mandiri, Benih
57	Jateng	Jepara	Bandeng	Mesin Pakan Mandiri, Benih
58	Jateng	Magelang	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
59	Jateng	Pekalongan	Nila Salin	Benih
60	Jateng	Pemalang	Kepiting	Benih
61	Jateng	Semarang	Lele	Calon Induk
62	Jateng	Sragen	Patin	Pompa Air
63	Jateng	Pati	Nila Salin	Kincir, Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri, Rehab Saluran, Saprass UPR, Kesling,
64	Jateng	Tegal	Nila Salin	Benih
65	Jateng	Banjanegara	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
66	Jateng	Brebes	Bandeng	SK Penetapan Kampung Bandeng
67	Jogjakarta	Sleman	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
68	Jatim	Bangkalan	Bandeng	Benih
69	Jatim	Banyuwangi	Lobster	Benih



No	Provinsi	Kab/Kota	Komoditas	Jenis Bantuan
70	Jatim	Blitar	Ikan Hias	Calon Induk
71	Jatim	Lamongan	Kerapu	Benih
72	Jatim	Probolinggo	Kerapu	Benih
73	Jatim	Sidoarjo	Rumput Laut	KBRL
74	Jatim	Sumenep	Rumput Laut	SK Penetapan Kampung Rumput Laut
75	Jatim	Gresik	Bandeng	Excavator, Kincir, Pompa Air, Mesin Pakan Mandiri, Kesling, Benih
76	Jatim	Kediri	Lele	SK Penetapan Kampung Lele
77	Jatim	Kota Kediri	Ikan Hias	SK Penetapan Kampung Ikan Hias
78	Jatim	Tulungagung	Gurami	SK Penetapan Kampung Gurami
79	Bali	Buleleng	Rumput Laut	SK Penetapan Kampung Rumput Laut
80	NTB	Bima	Rumput Laut	KBRL, Mesin Ketinting
81	NTB	Kota Bima	Bawal Bintang	Mesin Ketinting, Benih
82	NTB	Lombok Tengah	Nila	Mesin Pakan Mandiri
83	NTB	Lombok Timur	Lobster	KJA, Benih
84	NTB	Sumbawa	Kerang Mutiara	Mesin Ketinting
85	NTT	Rote Ndao	Rumput Laut	Mesin Ketinting
86	NTT	Kupang	Kerapu	KJA, Benih, Ketinting, Pakan
87	NTT	Sumba Timur	Rumput Laut	KBRL
88	Sulbar	Mamuju	Rumput Laut	KBRL
89	Sulsel	Bantaeng	Rumput Laut	KBRL
90	Sulsel	Luwu	Rumput Laut	KBRL
91	Sulsel	Pangkep	Bandeng	Mesin Pakan Mandiri
92	Sulsel	Pinrang	Udang Windu	Benih
93	Sulsel	Takalar	Rumput Laut	KBRL
94	Sulsel	Toraja Utara	Mas	Pompa Air, Benih
95	Sulsel	Wajo	Rumput Laut	KBRL
96	Sulsel	Bone	Bandeng	SK Penetapan Kampung Bandeng
97	Sulteng	Poso	Rumput Laut	KBRL
98	Sulut	Minahasa Utara	Mas	Benih
99	Gorontalo	Pohuwato	Bandeng	SK Penetapan Kampung Bandeng
100	Kalbar	Kapuas Hulu	Ikan Hias	SK Penetapan Kampung Ikan Hias
101	Kalbar	Mempawah	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
102	Kalbar	Sambas	Bandeng	SK Penetapan Kampung Bandeng
103	Kalsel	Banjar	Papuyu	Benih
104	Kalsel	Hulu Sungai Selatan	Gabus	Pompa, Benih
105	Kalsel	Hulu Sungai Tengah	Gabus	Pompa
106	Kalteng	Kapuas	Patin	Benih
107	Kalteng	Kota Palangkaraya	Baung	Benih
108	Kalteng	Kotawaringin Timur	Jelawat	Calon Induk
109	Kalteng	Pulang Pisau	Papuyu	Benih
110	Kalteng	Kotawaringin Barat	Gabus	SK Penetapan Kampung Gabus
111	Kaltim	Kutai Kertanegara	Nila	Benih, Calon Induk
112	Kaltim	Berau	Kerapu	SK Penetapan Kampung Kerapu
113	Kaltara	Bulungan	Udang Windu	Benih
114	Kaltara	Malinau	Nila	Benih
115	Kaltara	Tanah Tidung	Udang Windu	Benih
116	Kalut	Nunukan	Rumput Laut	SK Penetapan Kampung Rumput Laut
117	Kalut	Tanah Tidung	Udang Windu	SK Penetapan Kampung Udang Windu
118	Maluku	Maluku Tenggara	Rumput Laut	KBRL
119	Maluku	Tual	Teripang	SK Penetapan Kampung Teripang
120	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
121	Papua	Kep Yapen	Rumput Laut	KBRL
122	Papua	Jayapura	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
123	Papua	Keereom	Lele	SK Penetapan Kampung Lele
124	Papua	Kep Yapen	Rumput Laut	SK Penetapan Kampung Rumput Laut
125	Papua	Kota Jayapura	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
126	Papua	Waropen	Kepiting	SK Penetapan Kampung Kepiting
127	Papua Barat	Kaimana	Rumput Laut	SK Penetapan Kampung Rumput Laut
128	Papua Barat	Raja Ampat	Kerapu	SK Penetapan Kampung Kerapu



No	Provinsi	Kab/Kota	Komoditas	Jenis Bantuan
129	Papua Barat	Sorong	Nila	SK Penetapan Kampung Nila
130	Papua Barat	Teluk Wondama	Rumput Laut	SK Penetapan Rumput Laut

Saran dan rekomendasi pembangunan KPB pada tahun berikutnya, yaitu:

- Adanya program kampung perikanan budidaya (KPB) belum memberikan dampak terhadap peningkatan produksi, produktivitas serta peningkatan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan, sehingga pemerintah perlu secara konsisten untuk mengembangkan KPB terutama pada kawasan budidaya yang memiliki karakteristik komoditas unggulan;
- Intervensi pemerintah perlu terus dilanjutkan untuk memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap aspek:
 - Teknis : adanya peningkatan produksi budidaya, jumlah pembudidaya, luasan unit budidaya, kelengkapan sarana budidaya serta peningkatan sarana dan prasarana budidaya.
 - Ekonomis : peningkatan pendapatan pembudidaya, peningkatan kualitas produk dan harga jual serta menambah investasi budidaya.
 - Sosial: peningkatan kompetensi pembudidaya, peningkatan jumlah dan status pokdakan.
 - Lingkungan: peningkatan kesadaran pembudidaya untuk memperhatikan kelestarian lingkungan, pemantauan penyakit ikan dan merawat serta memperbaiki saluran irigasi.
- Pengembangan KPB perlu diarahkan agar implementasi teknologi disesuaikan dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
- Perlunya peningkatan kapasitas SDM pembudidaya melalui pelatihan dan Pendidikan.
- Perlu adanya jaminan pasar bagi produk perikanan di KPB serta jaminan asuransi budidaya untuk mengantisipasi adanya kerugian akibat gagal panen.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Kampung Perikanan Budidaya di 130 lokasi pasca pencadangan anggaran (automatic adjusmant) sebesar Rp121.280.171.000,- yang tersebar di Pusat dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp116.802.570.000 atau sebesar 96,31%.

SS.4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

IKU 5. Produksi Perikanan Budidaya

217	Realisasi 2017-2021				2022			Renstra 2020-2024	
	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
16,11	15,69	15,43	14,85	14,65	18,77	16,89	89,98	22,65	74,57

*juta ton

Capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 sebesar 16,88 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yakni sebesar 18,77 juta ton maka capaian produksi perikanan budidaya adalah sebesar 89,98 % . Produksi perikanan budidaya tahun 2022 naik jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 sebesar 14,65 juta ton.



Jika dilihat selama periode 2018 – 2022, volume produksi perikanan budidaya selama waktu tersebut mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata per tahunnya naik sebesar 0,58 persen.

Tabel 8. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2022

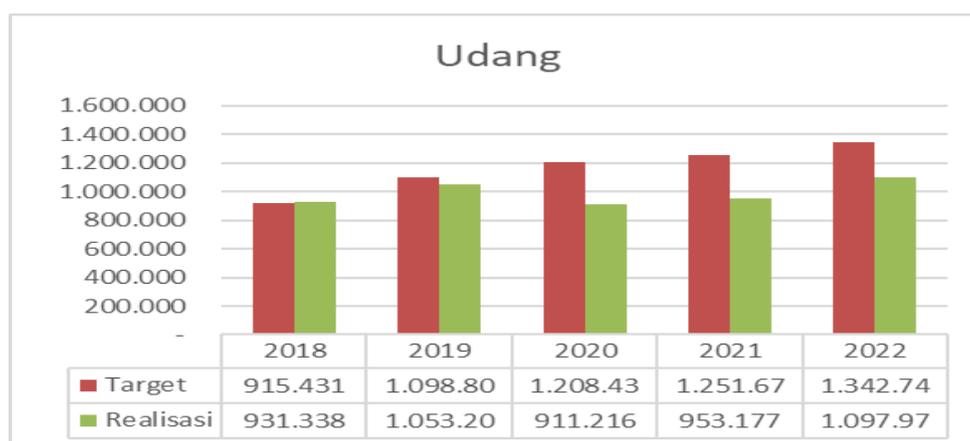
KOMODITAS	2018	2019	2020	2021	2022**	Pertumbuhan (%)
BANDENG	875.592	824.239	811.883	780.763	996.625	4,11
GURAMI	173.345	190.389	152.669	149.170	299.495	22,13
KAKAP	9.583	7.228	5.418	8.464	10.364	7,27
KEKERANGAN	49.450	37.963	34.427	42.944	94.255	27,92
KERAPU	16.414	13.829	9.478	13.422	14.912	1,38
LELE	944.779	1.088.945	993.768	1.041.422	1.377.581	10,90
MAS	534.215	620.831	560.669	651.238	750.983	9,50
NILA	1.171.236	1.317.561	1.172.633	1.300.529	1.642.644	9,68
PATIN	373.262	380.130	327.146	332.023	635.106	20,17
RUMPUT LAUT	10.320.202	9.775.986	9.618.421	9.092.031	9.296.179	-
UDANG	911.857	863.119	881.599	953.177	1.097.976	5,03
LAINNYA	308.798	305.405	276.905	283.126	670.451	32,15
TOTAL	15.688.734	15.425.625	14.845.015	14.648.310	16.886.570	2,13

Sumber data Pusdatin

*angka sementara

**angka perkiraan

▪ Udang

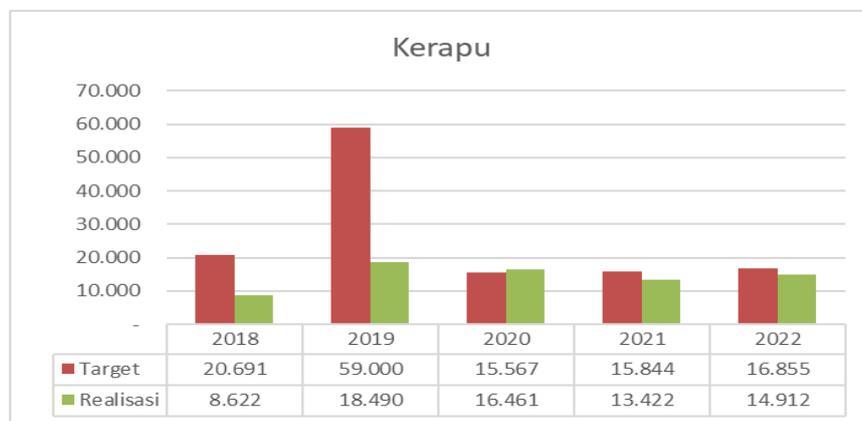


Gambar 10. Perkembangan produksi udang 2018-2022

Perkembangan produksi udang nasional tahun 2018 - 2022 mengalami penurunan dengan peningkatan rata-rata sebesar 5,03% per tahunnya. Namun pada tahun 2018 target produksi udang mencapai target sebesar 101,74 Persen. sementara tahun 2022 mencapai target sebesar 81,77%, tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena terhambatnya ekspor udang Indonesia karena ada penolakan komoditas ekspor udang di pasar USA, akan tetapi produksi masih tetap meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budidaya udang yang diinisiasi oleh Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB). Ditjen perikanan budidaya telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang adalah (i) Asuransi pembudidaya yang melindungi pembudidaya dalam berusaha; (ii) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (iii) Bantuan sarana budidaya udang yang merupakan stimulus bagi pembudidaya untuk meningkatkan usaha budidaya udang; (iv) Melakukan berbagai kerjasama lintas sektoral dan stakeholders lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan

prasarana budidaya, serta akses pasar dan permodalan; (v) Pengembangan pola budidaya berbasis manajemen kawasan/klaster; (vi) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vii) Peningkatan input teknologi budidaya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (viii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budidaya udang.

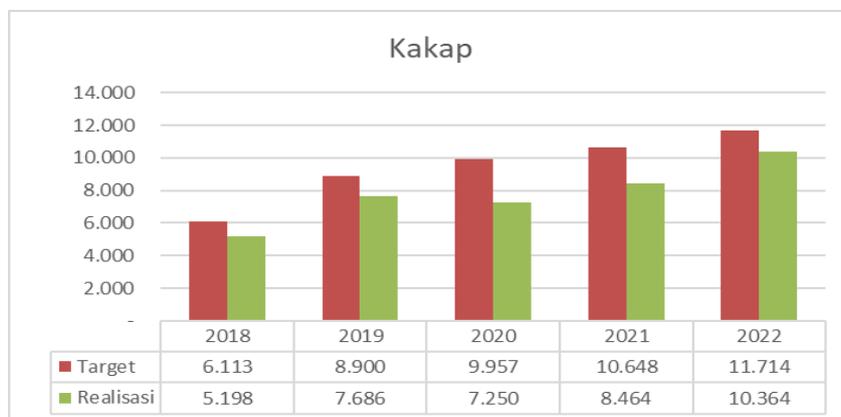
▪ **Kerapu**



Gambar 11. Perkembangan produksi Kerapu tahun 2018-2022

Trend produksi ikan kerapu dari tahun 2018 - 2022 menunjukkan kinerja yang kurang positif. Hal ini bisa dilihat dari trend produksinya yang cenderung stagnan dari tahun 2018. Namun produksi ikan kerapu pada tahun 2022 sedikit meningkat dari tahun 2021 mencapai 14.912 ton atau tercapai targetnya sebesar 88,47 % dari target sebesar 16.855 ton. Walaupun targetnya tidak tercapai namun peningkatan produksi ditahun 2022 mengindikasikan kebangkitan budidaya kerapu mengingat pandemic covid-19 sudah mulai mereda dan negara-negara pengimpor kerapu hidup sudah mulai membuka kran impornya. Untuk lebih memacu peningkatan produksi kerapu ini berbagai upaya telah dilakukan oleh DJPB antara lain (i) Penyediaan benih ikan kerapu yang bermutu di UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga (HSRT); dan (ii) Adanya kebijakan program bantuan KJA budidaya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budidaya kerapu di beberapa daerah potensial.

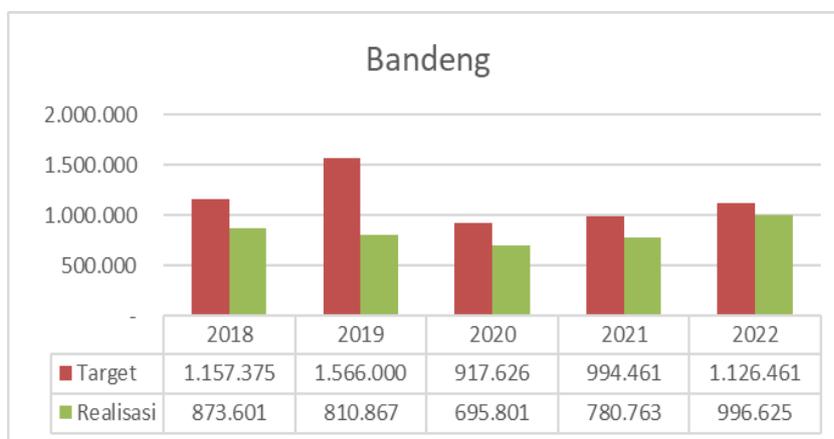
▪ **Kakap**



Gambar 12. Perkembangan Produksi Kakap Tahun 2018-2022

Capaian produksi ikan kakap dari tahun 2018 - 2022 sedikit mengalami kenaikan dengan kenaikan rata-rata sebesar 7,27% per tahun. Kakap merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang cukup digemari sebagai ikan konsumsi sehingga dengan sedikitnya produksi menyebabkan harga ikan kakap cenderung naik. Capaian produksi ikan kakap pada tahun 2022 mencapai 88,47% dari produksi yang ditargetkan. Ketidaktercapaian target produksi ini lebih banyak karena banyak KJA yang terlambat pengisian benihnya. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap DJPB telah mengalokasikan bantuan berupa KJA laut dan pengembangan benih kakap di beberapa UPT pusat untuk mendukung budidaya kakap di KJA laut.

▪ Bandeng

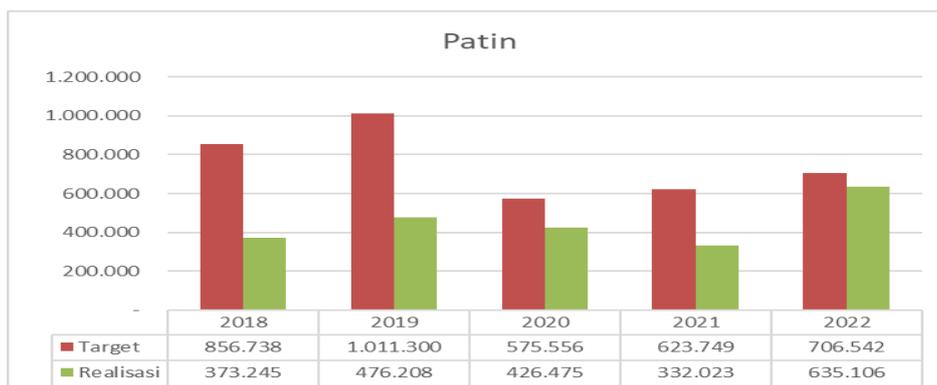


Gambar 13. Perkembangan produksi Bandeng Tahun 2018-2022

Perkembangan produksi bandeng dari tahun 2018 - 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,11%. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 karena pandemic namun diperkirakan dan meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022. Namun Selama kurun waktu tahun 2018 - 2022 target produksi bandeng tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh terbatasnya sentra produksi benih bandeng walaupun berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat masyarakat akan produk bandeng tetap tinggi. Indikasi masih adanya ekspor nener juga menyebabkan ketersediaan nener dalam negeri semakin berkurang sehingga semakin sulit untuk mencapai angka yang ditargetkan.

Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan Ditjen perikanan budidaya dengan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha budidaya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan broodstock bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2020-2024 akan mampu tercapai.

- **Patin**



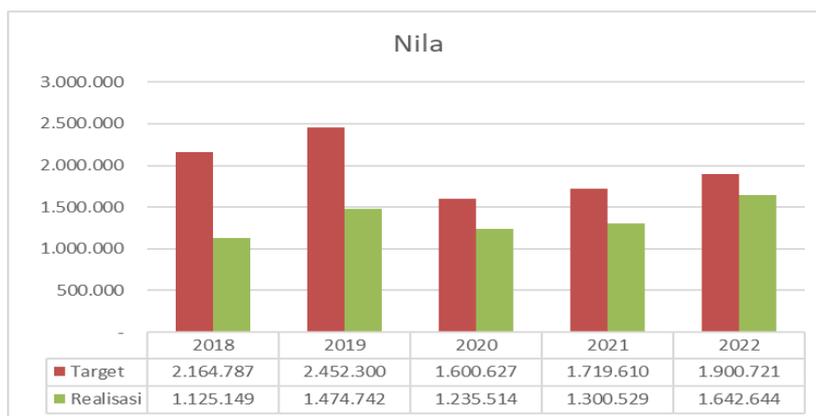
Gambar 14. Perkembangan produksi patin tahun 2018-2022

Produksi ikan patin dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 20,17%. Volume produksi pada kurun waktu tersebut masih belum mencapai target tahunan yang telah ditetapkan dalam renstra dengan capaian pada tahun 2022 terhadap target sebesar 89,89%. Belum tercapainya produksi ikan patin di tahun 2022 antara lain disebabkan karena masih sulitnya memasarkan ikan patin mengingat ikan patin merupakan ikan yang masih belum bisa diterima oleh semua etnik di Indonesia, ikan patin terutama banyak disukai di daerah Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan sementara itu di pulau Jawa yang merupakan potensi untuk pemasaran penduduknya masih kurang menyukai ikan patin. Disisi lain permasalahan tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan tidak sebanding dengan harga yang berlaku di pasaran, sehingga secara ekonomis tingkat efisiensi masih cukup rendah ditambah lagi dengan adanya pandemic covid-19. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan budidaya ikan patin melalui kerjasama sinergi, baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain, untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut diarahkan dalam rangka : (i) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti pada negara-negara yang banyak tenaga kerja indonesianya seperti arab Saudi dan daerah timur tengah lainnya; (ii) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien; (iii) Pengembangan kawasan budidaya ikan patin secara terintegrasi, serta (iv) Peningkatan nilai tambah produk menjadi hal mutlak dan terus dilakukan yaitu melalui pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin. Melalui upaya diatas, maka secara langsung akan mampu memberikan jaminan terhadap jalannya siklus bisnis yang positif dan berkesinambungan; (v) Mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.

- **Nila**

Produksi ikan nila dari tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata kenaikan 9,68%. Dilihat dari trend capaian produksi terhadap target tahunan menunjukkan bahwa angka produksi nila sampai dengan tahun 2022 belum dapat dicapai. Namun, capaian pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya mencapai 86,42% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah.





Gambar 15. Perkembangan produksi Nilai Tahun 2018-2022

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target volume produksi pada kurun waktu tersebut, antara lain dikarenakan secara umum kapasitas usaha yang dijalankan pembudidaya masih dalam skala kecil, juga adanya kegiatan rasionalisasi jumlah KJA baik di sungai atau danau juga turut mempengaruhi capaian produksi ikan nila.

Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain melalui (i) Pengembangan gerakan minapadi, (ii) Pengembangan budidaya ikan nila melalui intensifikasi dengan Bioflok dan Running Water; (iii) Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas; (iv) Ekstensifikasi pada kawasan potensial; serta (v) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas.

▪ **Ikan Mas**



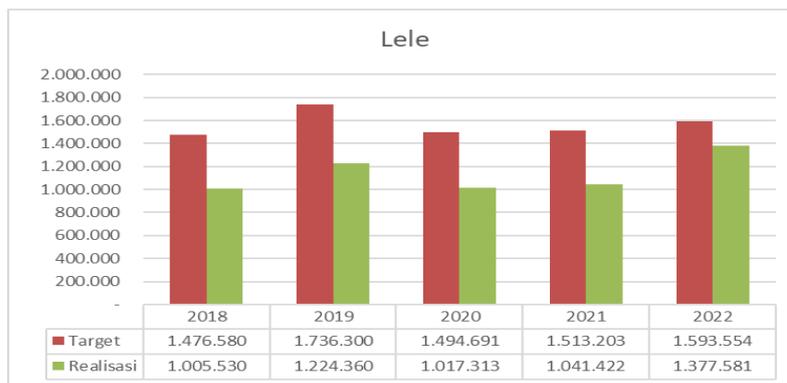
Gambar 16. Perkembangan produksi ikan Mas Tahun 2018-2022

Produksi ikan mas menunjukkan kenaikan selama tahun 2018 - 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,5%. Namun target produksi belum mencapai target. Belum tercapainya target produksi ikan mas terutama disebabkan merebaknya berbagai penyakit ikan yang menyebabkan tingkat produktifitas menurun.

Pencapaian target produksi ikan mas pada beberapa tahun belakangan ini dan tahun-tahun ke depan mengalami tantangan dengan adanya kebijakan zero kja dan beberapa daerah telah menerapkan kebijakan ini sehingga peningkatan produksi ikan mas mengalami kendala pandemic covid-19 juga secara nyata telah memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan produksi ikan mas. Namun Ditjen perikanan budidaya tetap berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dan dalam upaya pencapaian target volume produksi

tersebut, maka dilakukan upaya-upaya yang secara langsung mendorong peningkatan efisiensi produksi, diantaranya : (i) Intensifikasi melalui pengembangan teknologi baik budidaya maupun aspek nutrisi (pakan) yang berkualitas berbasis bahan baku lokal; (ii) Pengembangan kapasitas usaha dengan dukungan penguatan modal bagi usaha skala kecil melalui penguatan kemitraan usaha; (iii) Perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah; dan (iv) pengembangan budidaya ikan dikombinasikan dengan lahan padi atau minapadi

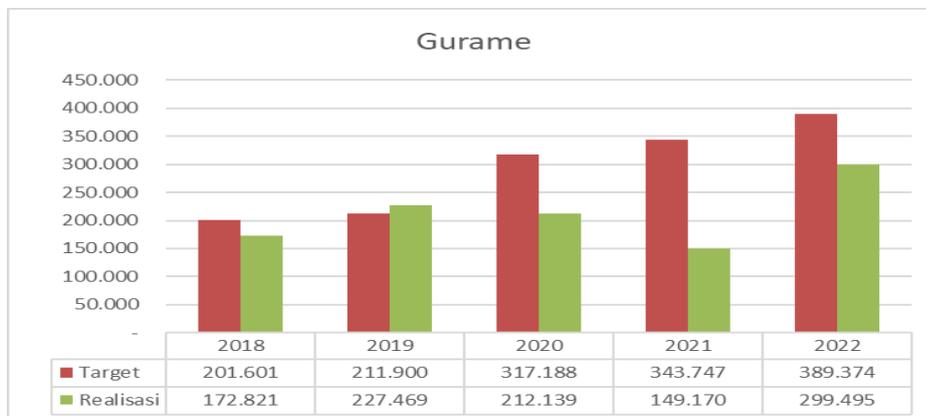
▪ **Lele**



Gambar 17. Perkembangan produksi Lele Tahun 2018-2022

Selama kurun waktu tahun 2018- 2022 produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 10,9%. Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun di tahun 2021 dan 2022 produksi mulai meningkat mengingat pandemi sudah beralih status menjadi endemi dengan semakin banyak penduduk Indonesia yang mendapat dosis vaksin ketiga, ikan lele yang bisa dibudidayakan dengan mudah ini memiliki satu kekuatan yaitu, untuk memenuhi lebutuhan lokal dengan adanya hasil positif selama beberapa tahun terakhir maka untuk mempertahankan pencapaian produksi lele di tahun selanjutnya, beberapa kegiatan yang perlu diteruskan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan teknologi budidaya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan; (ii) Penggunaan teknologi budidaya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efisiensi pemanfaatan lahan; (iii) Efisiensi pakan melalui bantuan gerakan pakan mandiri; dan (iv) pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.

▪ **Gurame**



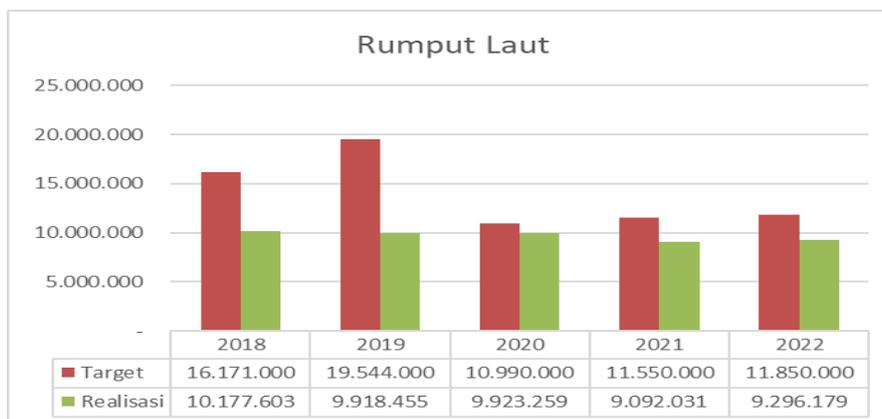
Gambar 18. Perkembangan produksi Gurame Tahun 2018-2022



Produksi gurame tahun 2018 - 2022 menunjukkan kinerja yang positif, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 22,13%. Angka capaian produksi tahun 2022 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 76,92%. Namun produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2022 ini. meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya yang masih cukup terbuka. Produksi gurame masih didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena proses produksi budidaya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame yang disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya.

Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budidaya gurame.

▪ Rumput Laut



Gambar 19. Perkembangan Produksi Rumput Laut Tahun 2018-2022

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan share sebesar 55,05% terhadap produksi perikanan budidaya. Perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2018 - 2022 menunjukkan trend yang negatif dengan rata-rata penurunan sebesar 2,53%. Penurunan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai jenuh yang disebabkan kualitas bibit yang semakin menurun sehingga kurang tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, sementara itu produksi bibit rumput laut kultur jaringan belum bisa menjangkau seluruh wilayah sentra budidaya rumput laut di Indonesia. Pada tahun 2022 awal juga terjadi badai di sentra budidaya rumput laut di Kabupaten Kupang sehingga produksi rumput laut secara nasional juga terpengaruh cukup signifikan.

walaupun mengalami penurunan produksi pada selama 5 tahun terakhir akan tetapi rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada total produksi perikanan budidaya, beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini karena budidaya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari per siklus sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budidaya yang mudah. Rumput laut juga cocok untuk



dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah yang masyarakat ekonominya digolongkan bawah. Keuntungan lainnya adalah modal kerja yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti biofuel, agar-agar, caragenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus menerus melakukan upaya terobosan diantaranya adalah pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria spp* dan *Eucheima cottonii*. Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Eucheima spinosum* dan *Caulerpa sp*.

Pencapaian volume produksi perikanan budidaya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Industrialisasi perikanan budidaya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya
- 2) Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan broodstock center : i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
- 3) Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budidaya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budidaya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budidaya berkelanjutan;
- 4) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana UPTD Provinsi; (ii) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (v) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; dan (vi) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet
- 5) Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan
- 6) Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah (i) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan (ii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
- 7) Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh 15 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Tidak tercapainya target produksi ikan dan produksi ikan hias dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

1. Regulasi : sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah, dimana kegiatan budidaya lebih banyak merupakan kewenangan Kabupaten terutama budidaya air tawar, padahal disatu sisi kabupaten/kota belum siap untuk mengembangkannya sehingga mengakibatkan terhambatnya pengembangan perikanan budidaya. Ini terjadi karena banyak Kabupaten/Kota yang anggarannya terbatas untuk pengembangan budidaya ; Dikeluarkannya Permenkp No 15 Tahun



2016 tentang Pembantasan kapal angkut ikan sehingga mengakibatkan terganggunya siklus produksi ikan terutama ikan laut khususnya kerapu

2. Sarana dan prasarana : Masih terbatasnya fasilitas pembenihan baik secara kualitas maupun secara kuantitas; Harga pakan yang masih cukup tinggi karena sebagian besar bahan baku masih impor, meskipun pemerintah telah melakukan program gerakan pakan mandiri tetapi masih belum mencukupi kebutuhan pakan nasional.
3. Masih munculnya hama penyakit ikan.
4. Kurangnya Fasilitas pengolahan mengakibatkan pembudidaya tidak dapat memaksimalkan produksinya. Fasilitas pengolahan ini cukup berperan karena sifat produk perikanan yang mudah rusak, sehingga diperlukan Teknik penanganan yang baik untuk menjaga kualitas dan nutrisi produk.

Untuk terus meningkatkan produksi perikanan budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya akan melakukan strategi :

1. Peningkatan fasilitas unit pembenihan di daerah melalui rehabilitasi sarana dan prasarana UPT baik pusat melalui dana APBN maupun UPTD melalui dana DAK..
2. Untuk mengantisipasi tiingginya harga pakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tetap melaksanakan kegiatan gerakan pakan mandiri dan juga melakukan trobosan untuk penyediaan pakan alternative, misalnya maggot.
3. Pemantauan secara continue untuk penanggulangan hama penyakit ikan

IKU 6. Produksi Ikan Hias

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
1,76	1,57	1,67	1,43	1,47	1,56	1,66	106,41	2,33	71,24

*satu milyar ekor

Realisasi volume produksi ikan hias Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,66 milyar ekor atau mencapai 106,41 % dari target sebesar 1,56 miliar ekor, artinya target ikan hias ditahun 2022 ini telah terlampaui.

Peningkatan produksi ikan hias pada tahun 2022 sedikit banyak dipengaruhi semakin diminatnya ikan hias asli Indonesia di pasar dunia, seperti arwana yang mulai merambah pasar dunia selain pasar asia, arwana juga sudah mulai memasuki pasar Amerika dan Eropa, adapun nilai ekspor ikan hias dunia sebesar USD399,60 juta, eksportir ikan hias dunia masih dikuasai oleh Jepang sebesar USD55,08 juta yang menguasai 13,78% pangsa pasar dunia. Disusul Singapura sebesar USD40,49 juta (10,13%) dan Spanyol sebesar USD 35,68 juta (8,93%).(<https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/45281-ikan-hias-indonesia-semakin-laku-di-dunia>) disamping itu semakin membaiknya kondisi pandemi covid-19 juga memberikan pengaruh yang cukup baik bagi perkembangan budidaya ikan hias, dukungan terhadap budidaya ikan hias diwujudkan oleh DJPB dengan menetapkan beberapa kampung ikan hias diantaranya Bogor, Karawang, Blitar dan Kediri, dengan ditetapkannya kabupaten-kabupaten tersebut sebagai kampung ikan hias dengan berbagai komoditas ikan hias yang menjadi unggulan seperti Kabupaten Blitar dengan budidaya koi dan mas koki, Kediri budidaya cupang, dengan adanya kampung ikan hias ini diharapkan dapat lebih menggairahkan pembudidaya ikan hias



dalam berinovasi mengembangkan jenis-jenis ikan hias dengan strain yang baru dan bukan merupakan jenis ikan yang invasif yang sudah jelas pelarangannya, diharapkan juga pembudidaya ikan hias mampu mengembangkan ikan hias endemik lokal yang cukup eksotis dan cukup banyak peminatnya di pasar luar negeri terutama USA dan Eropa.

Tabel 9. Produksi Ikan Hias Menurut Komoditas Tahun 2022 ** (1000 ekor)

KOMODITAS	REALISASI
TOTAL	1.660.000
Koi	484.391
Mas Koki	76.008
Cupang	21.839
Plati	58.675
Kuda Laut	6
Manfis	47125
Botia	17.871
Discuss	10.439
Oscar	17.497
Gapi	59.466
Banggai Cardinalfish	40
Moly	73.788
Nemo	279
Corydoras	12.975
Arwana	12.706
Blue devil/Betok Ambon	34
Lainnya	573.861

Untuk mencapai target tersebut perlu adanya strategi khusus dalam peningkatan produksi ikan hias nasional. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bantuan budidaya ikan hias. Bantuan ikan hias yang diberikan adalah dalam bentuk barang berupa Induk Ikan Koi (20 paket) dan Induk Ikan Maskoki (10 paket) yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Blitar.

Selain bantuan sarana prasarana, pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga memberikan dukungan dan ikut serta dalam kegiatan pameran/promosi ikan hias serta berperan dalam kontes-kontes ikan hias yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ikan Hias di berbagai Daerah.

Untuk tahun 2023 dalam rangka mencapai target produksi ikan hias, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias sebanyak 90 paket yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis.

IKU 7. Tenaga Kerja yang Terlibat

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	-	-	23.348	45.813	196,60%	-	-

*IK baru Tahun 2022

Indikator Kinerja Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Indikator Tenaga kerja yang



terlibat ini secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Kegiatan sektor KP terdiri dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran, usaha garam, penyuluhan, dan karantina ikan. Khususnya Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada perikanan budidaya yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Sektor perikanan budidaya merupakan sektor yang melibatkan banyak keterlibatan dan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan peningkatan sektor perikanan budidaya sebanding dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Adapun penyerapan tenaga kerja di perikanan budidaya meliputi kegiatan Pengelolaan Pembenihan Ikan, Pengelolaan pakan dan Obat Ikan, pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan, dan Pengelolaan produksi dan obat ikan.

Adapun perhitungan Indikator ini dengan formula tenaga kerja yang terlibat adalah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dengan Realisasi tenaga kerja di tahun 2022 sebesar 45.813 .orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10. Capaian Tenaga Kerja Terlibat Bidang Perikanan Budidaya

No	Bidang	Jumlah Tenaga Kerja	Keterangan
1.	Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	12.592	Tenaga kerja dihitung dari tenaga kerja yang terserap baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan bantuan pemerintah
2.	Bidang Pakan dan Obat Ikan	4.138	
3.	Bidang Perbenihan	20.210	
4.	Bidang Produksi dan Usaha	8.963	
	Jumlah	45.903	

Upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain (1) peningkatan percepatan pelaksanaan kegiatan lingkup DJPB sehingga penyerapan tenaga kerja semakin meningkat; (2) berkoordinasi dengan K/L terkait dengan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan budidaya ; (3) optimalisasi UPT lingkup DJPB dalam pelaksanaan ketenaga kerjaan.

SS.5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya ini merupakan sasaran baru menggantikan sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya yang partisipatif. SS ini diganti untuk perbaikan dari hasil temuan atas evaluasi SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya yang di evaluasi KeMenPan tahun 2021.

IKU 8. Prosentase Jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
99,94	100	99,92	99,66	99,80	97	99,89	102,98	97%	102,98

Indikator kinerja prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan merupakan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan monitoring residu yang sekaligus memberikan gambaran terhadap produk perikanan budidaya yang bebas residu atau aman dikonsumsi.



Indikator kinerja tersebut belum dituangkan di dalam Renstra 2020-2024 sehingga belum dapat dibandingkan capaiannya dengan target renstra. Renstra tahun 2020-2024 baru mengakomodir indikator kinerja secara output yaitu jumlah sampel monitoring residu dengan target 18.000 sampel.

Ruang lingkup kegiatan monitoring residu mencakup pengambilan sampel, penanganan sampel, pengiriman sampel dan pengujian sampel guna memastikan penerapan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan budidaya telah memenuhi persyaratan global. Pelaksanaan kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019 tentang pengendalian residu pada kegiatan pembudidayaan ikan konsumsi yang dilaksanakan berdasarkan rencana monitoring residu nasional (RMRN) atau *National Residue Monitoring Plan* (NRMP). RMRN memuat perencanaan monitoring residu untuk periode 1 (satu) tahun, diantaranya: target lokasi, jenis komoditas, jumlah sampel, substansi uji, dan laboratorium acuan & pengujian yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Lokasi yang menjadi obyek monitoring residu merupakan provinsi yang mempunyai kontribusi besar terhadap produksi perikanan budidaya nasional. Provinsi sebagai pelaksana monitoring residu pada tahun 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) Provinsi, yang meliputi: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Penetapan target sampel mempertimbangkan jumlah produksi nasional perikanan budidaya pada tahun sebelumnya di 26 (dua puluh enam) Provinsi dengan ketentuan setiap 100 (seratus) ton sampel diambil 1 (satu) sampel. Pengujian sampel residu dialokasikan di 15 (lima belas) laboratorium pengujian sesuai yang tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No 44 tahun 2022 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2022. Pengujian sampel residu dilakukan terhadap 5 komoditas perikanan budidaya yaitu udang, nila, bandeng, lele dan patin terhadap substansi yang tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Nomor: 37/PERMEN-KP/2019.

Capaian indikator prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan diperoleh berdasarkan hasil uji sampel yang *compliance* dibandingkan dengan realisasi jumlah sampel monitoring residu di 26 Provinsi. Capaian Indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil uji sampel yang *compliance* dibandingkan dengan realisasi jumlah sampel monitoring residu di 26 provinsi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah sampel monitoring residu yang terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 3.669 sampel.
2. Hasil uji yang *non compliance* atau terdeteksi residu berjumlah 4 sampel sehingga jumlah sampel yang *compliance* atau bebas residu sebanyak 3.665 sampel.

Berdasarkan data pengambilan dan pengujian sampel residu maka perolehan realisasi sebesar 99,89% dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu) Tahun 2022

No	Provinsi	Komoditas	Sampel		Hasil Uji		
			Target	Realisasi	Non Compliance	Compliance	Prosentase Compliance (%)
1	Aceh	Udang	146	146	0	146	100%
2	Sumatera Utara	Udang	146	146	0	146	100%
		Nila	40	40	0	40	100%
3	Sumatera Barat	Nila	49	56	0	56	100%
4	Riau	Patin	45	45	0	45	100%
5	Bengkulu	Udang	55	60	0	60	100%
6	Jambi	Patin	36	45	0	45	100%
7	Sumatera Selatan	Udang	70	70	0	70	100%
		Patin	40	40	0	40	100%
8	Bangka Belitung	Udang	32	34	0	34	100%
9	Lampung	Udang	209	209	0	209	100%
10	Banten	Udang	17	20	0	20	100%
11	Jawa Barat	Udang	260	260	0	260	100%
		Nila	56	56	0	56	100%
		Lele	75	75	2	73	97,33%
12	Jawa Tengah	Udang	119	129	0	129	100%
		Nila	52	52	0	52	100%
13	DI Yogyakarta	Udang	23	27	0	27	100%
14	Jawa Timur	Udang	419	434	0	434	100%
		Bandeng	160	187	0	187	100%
		Nila	90	126	0	126	100%
		Lele	240	276	2	274	99,28%
15	Bali	Udang	27	29	0	29	100%
16	NTB	Udang	292	292	0	292	100%
17	Kalimantan Barat	Udang	24	26	0	26	100%
18	Kalimantan Tengah	Udang	15	15	0	15	100%
19	Kalimantan Selatan	Udang	44	48	0	48	100%
20	Kalimantan Timur	Udang	103	103	0	103	100%
21	Kalimantan Utara	Udang	56	60	0	60	100%
22	Sulawesi Selatan	Udang	112	112	0	112	100%
		Bandeng	68	68	0	68	100%
23	Sulawesi Tengah	Udang	66	66	0	66	100%
24	Gorontalo	Udang	56	62	0	62	100%
25	Sulawesi Tenggara	Udang	192	192	0	192	100%
26	Sulawesi Barat	Udang	63	63	0	63	100%
TOTAL			3497	3669	4	3665	99,89%

Tabel 12. Data Sampel Pengujian Sampel Non Compliance Tahun 2022

No	Provinsi	Kabupaten	Komoditas	Jumlah Sampel	Parameter	BMR ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Hasil Uji ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1	Jawa Barat	Bogor	Lele	2	Enrofloxacin	100	386
					Enrofloxacin	100	238
2	Jawa Timur	Pasuruan	Lele	2	Enrofloxacin	100	185
					Enrofloxacin	100	133

Keterangan : BMR : Batas Maksimum Residu, mengacu lampiran II PERMEN-KP Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi



Dengan ditemukannya kandungan residu pada 4 sampel lele di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat telah menindaklanjuti dengan melakukan tindakan investigasi pada unit budidaya yang diketahui *Non Compliance*. Hasil investigasi menunjukkan bahwa ada indikasi penggunaan antibiotik yang mengandung *enrofloxacin* tanpa memperhatikan aturan pakai sehingga menimbulkan masalah keamanan pangan berupa terbentuknya residu pada kandungan daging ikan lele.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian indikator “Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu)”, diantaranya : (i) masih rendahnya pemahaman pembudidaya tradisional terhadap penggunaan obat ikan, (ii) pengambilan sampel di unit budidaya yang bersertifikat masih terbatas, (iii) petugas pengambil sampel residu belum memperhatikan waktu luruh obat dalam pengambilan sampel dan (iv) keterlambatan operator dinas provinsi menginput data sampel.

Berkaitan dengan pencapaian indikator kinerja yang telah melampaui target, maka perlu upaya untuk mempertahankan maupun meningkatkan capaian indikator tersebut pada tahun berikutnya melalui: (a) pembinaan/edukasi untuk meningkatkan pengetahuan kepada pembudidaya terkait dengan (i) penggunaan obat ikan secara bijak dan upaya menghindari residu pada ikan budidaya; (ii) pengendalian penyakit ikan dan (iii) penerapan cara budidaya ikan yang baik serta (b) menginformasikan kepada dinas KP Provinsi agar melaksanakan kegiatan monitoring residu sesuai dengan ketentuan.

Anggaran setelah *Automatic Adjustment* (AA) yang dialokasikan dalam mencapai indikator “Prosentase Jumlah Sampel Residu yang Memenuhi Ketentuan (bebas residu)” berupa anggaran dekonsentrasi di 26 Provinsi sebagai pelaksana kegiatan monitoring residu sebesar Rp 8,166,656,048,- yang telah direalisasikan sebesar Rp 7,553,938,692,- atau sekitar 92,49%. Sementara, anggaran yang dialokasikan di Pusat melalui Perjalanan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan dalam mendukung Kegiatan Prioritas sebesar Rp 42.000.000, hingga akhir tahun 2022 telah terserap 100%.

SS.6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

IKU 9. Nilai PMP RB Ditjen Perikanan Budidaya

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
91,87	89,27	22,89	31,55	32,51	33,00	34,04	103,12	36	94,55

* mulai tahun 2019-2022 perhitungan capaian IKU berbeda dengan tahun 2017-2018

Secara umum kinerja reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2022 mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi PMPRB DJPB Tahun 2021-2022 Nomor: BAHE.PMPRB-04/ITJ/IV/2022 Tanggal 25 April 2022 memperoleh nilai sebesar 34,04 dari target IKU 2022 sebesar 33,00 atau 103,12% dari target yang telah ditetapkan. Hasil tersebut juga meningkat dari capaian tahun 2020-2021 sebesar 32,51. Beberapa improve yang berhasil dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi DJPB tahun 2022 antara lain:



1. Presentase jumlah agen perubahan yang menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan meningkat dari 44% (11/25) pada tahun 2021 meningkat menjadi 83% (20/23) di tahun 2022;
2. Melakukan deregulasi kebijakan terkait kemudahan pelayanan publik yaitu Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan (Memuat semua NSPK pelayanan perizinan di DJPB, Sebelumnya NSPK pelayanan perizinan terpisah-pisah dan tidak di susun dalam 1 Peraturan Menteri-KP, Merupakan simplifikasi dari beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, antara lain Permen-KP Nomor 49 Tahun 2014, Permen-KP Nomor 55 Tahun 2018, Permen-KP Nomor 1 Tahun 2019, KEP.02/MEN/2007, 15/PERMEN-KP/2020, 30/PERMEN-KP/2020);
3. Peningkatan Status Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang (Eselon IV.a) menjadi Balai Pengujian Kesehatan dan Lingkungan Serang (eselon III.a) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri KP Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KP Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Perikanan Budidaya;
4. Upaya peningkatan kompetensi SDM yang menangani akuntabilitas kinerja meningkat;
5. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan;
6. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan;

Secara umum permasalahan yang terjadi pada tw 3 adalah terkait keterlambatan unit kerja dalam menyusun laporan kegiatan sehingga realisasi dari pelaksanaan kegiatan belum bisa diinput kedalam LKE dan matrik money rencana aksi tw 3 karena belum tersedia data dukung yang dibutuhkan, hal itu telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan untuk menyelesaikan laporan agar segera dapat diinput ke dalam LKE PMPRB.

Hasil PMPRB DJPB tahun 2021-2022 yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform telah mencapai hasil 103% dari target IKU 2022, berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian IKU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa permasalahan terkait dengan pencapaian IKU ini adalah pada aspek reform dimana beberapa indikator penilaian sulit dikontrol capaiannya antara lain:

1. Pada area peningkatan kualitas SDM Aparatur terdapat indikator penilaian berupa jumlah pelanggaran aturan disiplin tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk memperoleh nilai maka jumlah pelanggaran tahun berjalan harus lebih sedikit dari jumlah pelanggaran aturan disiplin tahun sebelumnya. Sedangkan apabila jumlahnya sama atau lebih banyak maka akan memperoleh 0.
2. Pada area penguatan akuntabilitas terdapat indikator penilaian persentase capaian sasaran kinerja 100% atau lebih dan persentase jumlah anggaran yang berhasil di refofusing. Pada tahun 2022 jumlah sasaran kinerja yang tercapai 100% atau lebih sebanyak 18 dari 22 sasaran kinerja atau 86% untuk meningkatkan nilai dari indikator ini maka pada tahun 2023 capaiannya harus lebih dari 86%. Sedangkan untuk meningkatkan persentase anggaran yang berhasil di refofusing cukup sulit ditentukan nilainya.

Guna mendukung PMPRB berikutnya yaitu Pembentukan Tim RB untuk tahun 2023, Penyusunan Rencana Aksi RB untuk tahun 2023, penyusunan dokumen bukti dukung perlu



dilaksanakan tepat waktu untuk menjamin penyelesaian PMPRB dengan hasil yang baik. Selain itu juga diperlukan komitmen dan keterlibatan dari pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi.

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, Ditjen Perikanan Budidaya menempati urutan ke empat dari Sembilan Unit kerja eselon I. Perbandingan dengan capaian eselon I Lingkup KKP, sebagai berikut:

PENILAIAN	BOBOT	SETJEN	ITJEN	DJPT	DJPB	PSDKP	PDSPKP	PRL	BRSDM	BKIPM
PENGUNGKIT (36,30)										
I. PEMENUHAN (14,60)										
Manajemen Perubahan	2,00	1,60	2,00	1,50	1,89	1,96	1,93	1,72	1,91	1,65
Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Penataan Tatalaksana	1,00	0,89	0,96	0,90	0,92	0,96	0,98	0,89	0,98	0,89
Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,25	1,40	1,30	1,32	1,30	1,21	1,14	1,17	1,37
Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,45	2,50	2,45	2,50	2,25	2,50	2,50
Penguatan Pengawasan	2,20	1,98	1,99	1,89	2,13	2,14	2,18	1,97	1,98	1,95
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,43	2,28	2,35	2,38	2,08	2,42	2,20	2,15	2,42
Total Pemenuhan	14,60	13,66	14,13	13,38	14,14	13,89	14,23	13,17	13,70	13,78
II. REFORM (21,70)										
Manajemen Perubahan	3,00	2,31	2,84	2,72	2,74	3,00	2,33	3,00	2,46	2,48
Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Penataan Tatalaksana	3,75	3,58	3,10	3,75	3,75	3,75	3,25	3,58	3,13	3,75
Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,63	1,50	2,00	1,50	1,56	1,72	1,46	1,88	1,50
Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,15	3,40	3,42	3,34	3,75	3,53	3,73	3,33	3,33
Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,94	1,95	1,95	1,94	1,95
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75	3,03	3,13	3,33	3,75	3,21	3,75	3,47
Total Reform	21,70	19,87	20,04	20,36	19,90	20,83	20,03	20,44	19,99	19,98
Total (Pemenuhan+Reform)	36,30	33,52	34,17	33,74	34,03	34,72	34,25	33,61	33,65	33,76

Anggaran untuk mendukung IKU “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya” pada triwulan IV tahun 2022 realisasi mencapai Rp. 97.085.900,- dari pagu sebesar Rp.98.000.000,- atau sebesar 99,07% dari keseluruhan anggaran.

IKU 10. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	63,92	74,70	80,94	80	83,35	104,19	76	109,67



Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022, berdasarkan hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP tanggal 9 Januari 2023 yaitu **83,35 (kategori tinggi)** terdiri dari **Kualifikasi 12,81, Kompetensi 38,16, Kinerja 27,50** dan **Disiplin 4,88**. Target Tahun 2022 sebesar 80. Berdasarkan capaian Tahun 2022 sebesar 83,35 dari target Tahun 2022 sebesar 80 yang sudah melebihi target yaitu 104,19%.

Tabel 13. Capaian IP ASN Tahun 2022 Eselon I lingkup KKP

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	16,12	37,57	28,78	4,99	82,46
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	15,89	38,06	25,85	4,99	84,79
3	Ditjen Perikanan Tangkap	12,25	38,19	25,39	4,99	80,81
4	Ditjen Perikanan Budidaya	12,81	38,16	27,50	4,88	83,35
5	Ditjen PDS	16,01	38,92	25,10	4,99	85,02
6	Ditjen PSDKP	13,06	37,62	24,91	4,96	80,55
7	Inspektorat Jenderal	15,94	38,85	25,62	4,94	85,36
8	BRSDMKP	14,32	36,45	24,35	4,83	79,94
9	BKIPM	12,53	38,99	27,42	4,92	83,86
KKP		14,33	37,87	25,77	4,94	82,90

Keterangan: Jumlah Database sebesar 11.765 PNS KKP, tanpa data BP Batam dan CPNS. Data terakhir diambil pada tanggal 9 Januari 2023. Dashboard Pengukuran IP ASN dapat dilihat pada laman <http://www.ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/dashboard>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa capaian IP ASN Ditjen Perikanan Budidaya sudah melampaui target yang ditetapkan dan jika dilihat dari capaian IP ASN KKP, DJPB sudah diatas capaian KKP.

Anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 613.635.000,- Realisasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 610.567.100,- atau sebesar 99,50% dari keseluruhan anggaran.

Permasalahan dalam mencapai IKU ini, antara lain :

1. Terkait dengan dimensi kualifikasi, belum semua pegawai yang telah selesai melaksanakan pengembangan kualifikasi melalui tugas belajar dan izin belajar mengajukan usul peningkatan pendidikan, sehingga mengakibatkan data menjadi kurang akuntabel;
2. Terkait dengan dimensi kompetensi, belum semua pegawai melakukan *updating* pengembangan kompetensi baik melalui Diklat atau Seminar;
3. Terkait dengan dimensi kinerja, belum semua pegawai melakukan pengisian realisasi kinerja individu sesuai dengan batas yang telah ditentukan;
4. Terkait dengan disiplin, penanganan disiplin membutuhkan beberapa tahapan sehingga terdapat beberapa pelanggaran disiplin yang belum selesai tindaklanjutnya.

Rencana kedepan/tahun berikutnya

1. Terkait dengan dimensi kualifikasi, sesuai dengan penjadwalan layanan kepegawaian yang telah disampaikan BKN bahwa proses peningkatan pendidikan akan dilakukan pada bulan Maret s.d. Mei dan bulan September s.d. November. Dengan demikian, diharapkan proses tersebut dapat mendistorsi usul peningkatan pendidikan yang terlewat.



2. Terkait dengan dimensi kompetensi, kami akan menghimpun data pengembangan kompetensi melalui Diklat dan Seminar selama 1 tahun dan akan diinfokan ke seluruh pegawai, dengan harapan pegawai dapat memilih jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatannya, untuk perencanaan diklat PKN, PKA dan PKP telah diusulkan ke Biro SDMAO dan perencanaan Diklat Analis Akukultur dan Polkeskan angkatan II akan dilaksanakan akhir Februari sd pertengahan Maret 2023. Serta diklat-diklat lain yang sedang dikoordinasikan dengan Puslatluh-BRSDMKP.
3. Terkait dengan dimensi kinerja, mengingat rencana penilaian kinerja KKP Tahun 2023 akan menggunakan aplikasi kinerja BKN, kami akan lebih aktif lagi untuk mengingatkan pegawai agar lebih disiplin dalam mengisi realisasi kenerja, dikarenakan pada aplikasi tersebut terdapat tenggang waktu untuk pengisian realisasi.
4. Terkait dengan dimensi disiplin, kami akan segera menyelesaikan pelanggaran disiplin yang belum selesai ditindaklanjuti di tahun 2022, diagendakan pada semester I tahun 2023.

IKU 11. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
1	4	5	7	8	9	11	120	10	110

Dari hasil pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1. Sampai dengan tahun 2022 maka seluruh UPT lingkup DJPB telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
2. Sedangkan pada satker Pusat yang sebelumnya hanya terdapat 2 (dua) unit kerja pelayanan yaitu Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dan Direktorat Pakan dan Obat Ikan, dengan berlakunya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama dan Produk Pelayanan Publik KKP dimana DJPB menambah 1 jenis layanan dari Direktorat Perbenihan yaitu Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) maka dengan demikian jumlah UPP satker pusat bertambah 1 menjadi 3 satker UPP. Hal ini menjadi catatan tersendiri yaitu masih ada 2 (dua) satker UPP Pusat yaitu Direktorat Pakan dan Obat Ikan dan Direktorat Perbenihan yang belum dicanangkan untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
3. Dari jumlah keseluruhan 18 UPP lingkup DJPB (3 Pusat dan 15 UPT) diperoleh capaian sampai dengan 2022: 16 UPP telah melakukan pembangunan ZI Menuju WBK; 11 UPP telah memperoleh predikat Menuju WBK (2 WBK Nasional dan 9 WBK lingkup KKP);

Tabel 14. Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2013-2022

No.	Unit Kerja	WBK		WBBM	
		TPI	TPN	TPI	TPN
1.	BBPBAT Sukabumi	2013	2014	-	-
2.	BBPBAP Jepara	2018	2021	-	-
3.	BPBAT Mandiangin	2018	-	-	-
4.	BPBL Ambon	2018	-	-	-
5.	BPBL Batam	2019	-	-	-
6.	BBPBL Lampung	2020	-	-	-



No.	Unit Kerja	WBK		WBBM	
		TPI	TPN	TPI	TPN
7.	BPIUUK Karangasem	2020	-	-	-
8.	BPKIL Serang	2021	-	-	-
9.	BPBAT Sungai Gelam	2022	-	-	-
10.	BPBAP Situbondo	2022	-	-	-
11.	BPBL Lombok	2022	-	-	-

4. Dari target IKU DJPB tahun 2022 yaitu 1 (satu) unit kerja memperoleh predikat Menuju WBK capaian yang diperoleh adalah 3 (tiga) unit kerja. Hal ini menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU tersebut selama tahun 2022 membuahkan hasil yang baik dan melampaui target serta dapat menjadi standar untuk diterapkan pada tahun berikutnya bahkan untuk ditingkatkan.

Anggaran untuk mendukung IKU “Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi” pada triwulan IV tahun 2022 realisasi mencapai Rp. 325.359.340,- dari pagu sebesar Rp.327.000.000,- atau sebesar 99,50% dari keseluruhan anggaran.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Telah dilakukan koordinasi dan evaluasi untuk melengkapi dokumen penilaian evaluasi WBK/WBBM oleh Itjen V, KKP dan mengupload dokumen bukti dukung ke aplikasi e-ZI.
2. Telah dilakukan asistensi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM kepada BPBAT Sukabumi (dalam rangka evaluasi WBK 2 tahun), BPBAT Jambi, BPBL Lombok, dan BPBAP Situbondo (dalam rangka persiapan penilaian TPI 2022), BLUPPB Karawang (penyusunan dokumen data dukung) dan BPKIL Serang (Pemantauan implementasi predikat Menuju WBK);
3. Telah dilakukan koordinasi dengan BPBAT Jambi, BPBAP Situbondo dan BPBL Lombok dalam rangka persiapan untuk mengikuti penilaian TPI pada triwulan 3 dan 4 tahun 2022. Hasil yang diperoleh adalah ketiga satker tersebut berhasil memperoleh predikat Menuju WBK lingkup KKP.

Dalam rangka pemenuhan dokumen bukti dukung pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Masih banyak kekurangan dan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh satker. Hal ini dapat dimaklumi karena satker masih dalam tahap awal dan juga bertepatan dengan transisi perubahan LKE ZI yang baru saja mengalami perubahan mengikuti terbitnya PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah pada bulan Desember 2021 yang lalu.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada unit kerja yang telah ditunjuk dapat terlaksana dengan baik. Rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan pada tahun 2023 adalah Melakukan monev dan asistensi pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada 4 (empat) satker lingkup DJPB yaitu BPBAT Tatelu, BPBAP Takalar, BPBAP Ujung Batee dan BLUPPB Karawang.



IKU 12. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 (%)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	0,02	0,14	0,2	≤1	0,03	120	>1	120

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan dengan Realisasi anggaran T.A 2021 dengan capaian 0,3% dari target maksimal 1% atau mencapai 120%. Keberhasilan pencapaian nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dapat ditekan berada dibawah 1% merupakan komitmen Ditjen Perikanan Budidaya untuk menindak lanjuti berbagai masalah maupun rekomendasi yang telah dilaporkan oleh BPK. Pada tanggal 4 Juli 2022, Itjen KKP berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian temuan-temuan tersebut. Itjen sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga harus terus mendorong tindak lanjut laporan BPK RI tersebut. Adapun fokus utama dalam LHP atas SPI tersebut terkait permasalahan- permasalahan pengelolaan aset di lingkungan KKP, diantaranya terkait saldo aset tetap yang tidak wajar, penghapusan aset-aset rusak berat, hasil revaluasi aset tetap peralatan dan mesin serta aset tetap tanah dan bangunan, hibah aset eks dekon dan TP, dan permasalahan lainnya.

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan atas permasalahan tersebut antara lain: Mempertimbangkan Tingkat Risiko Terhadap capaian kegiatan dan program prioritas dan strategis dalam Mengusulkan penghematan Anggaran; Meningkatkan Peran Satgas SPIP baik di tingkat Pusat Maupun di Tingkat satker.

IKU 13. Nilai PM SAKIP DJPB (nilai)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
88,19	84,32	85,88	86,70	86,54	80,01	80,03	100,20	86,75	92,25

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih

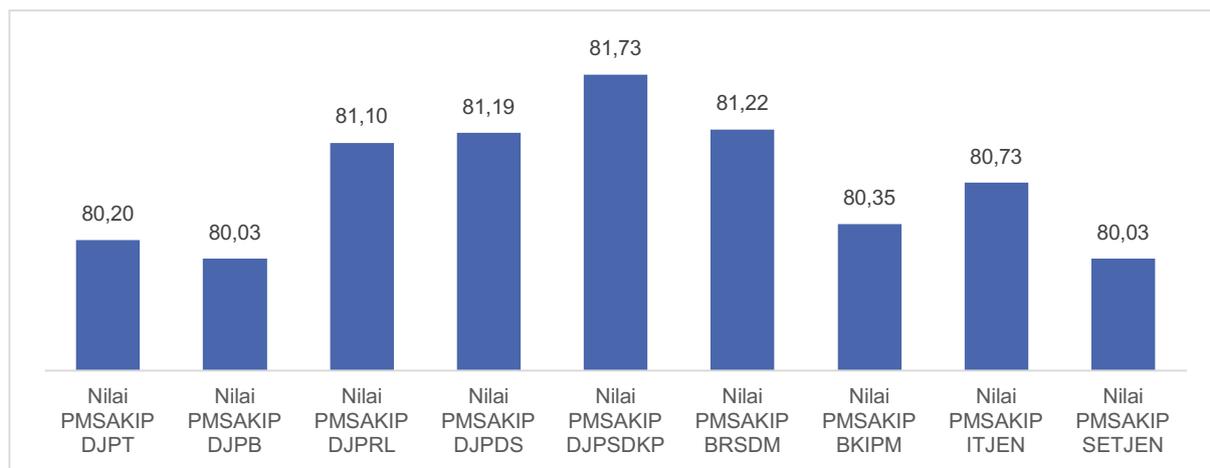


baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP

Target indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 ini mengalami penyesuaian akibat adanya perubahan cara perhitungan, dari yang sebelumnya menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, berubah menggunakan LKE sesuai Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021, dengan perbedaan formulasi dan bobot penilaian perhitungan sehingga target semula 86,25 berubah menjadi 80,01 (kategori A/Memuaskan).

Apabila dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP, Ditjen Perikanan Budidaya mendapatkan peringkat terbawah, sebagaimana disajikan pada grafik berikut:



Gambar 20. Capaian Nilai PM SAKIP Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2022

Tahun 2022 penilaian AKIP Ditjen Perikanan Budidaya dilaksanakan pada bulan Juli 2022 oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui desk study dan penilaian lapangan dengan capaian 80,03 dari target 80,01 atau mencapai 100,02%. Capaian tersebut sesuai hasil Surat Inspektorat Jenderal, KKP Nomor T.185/ITJ.3/HP.440/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Ditjen Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan evaluasi terhadap lima komponen utama SAKIP yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi. Selain itu, Selanjutnya disampaikan dilakukan juga evaluasi atas dokumen yang meliputi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen terkait lainnya.

IKU 14. Tingkat Maturitas SPIP (Level)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
2,76	3,4	3,44	4	3,87	3	3,81	127	3	187

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) oleh BPKP tersebut dilakukan terhadap 5 unsur SPIP yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Selain itu, penilaian juga dilakukan terhadap 25 Sub Unsur SPIP dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat kematangan penyelenggaraan/maturitas implementasi SPIP berdasarkan penilaianmandiri yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Penilaian Indikator Nilai Maturitas SPIP terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan Level 5 (Optimum). Maturitas SPIP sendiri adalah suatu tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian internal yang ditandai oleh eksistensi desain pengendalian internal. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Setiap tingkat maturitas memiliki karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Semakin tinggi tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan birokrasi yang semakin berkualitas.

Pada Tahun 2022, capaian indikator ini berdasarkan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya oleh Inspektorat IV diperoleh nilai Level 3.80 (Terdefinisi) berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP Nomor B.605/SJ/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021/2022. Kegiatan Penjaminan ini untuk memberikan penilaian yang independen dan obyektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/ implementasi SPIP berdasarkan penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh Auditor APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Hal ini berarti bahwa target yang ditetapkan di Tahun 2022 telah tercapai dengan capaian sesuai target, walaupun demikian, nilai capaian tersebut tidak lebih baik dibandingkan TA 2021 yaitu 3,87 menjadi 3,80 di Tahun 2022. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Pelaksanaan pengendalian belum dilaksanakan secara efektif.
2. Kurangnya penyusunan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan perencanaan pelaksanaan kegiatan unit kerja Evaluasi pedoman/kebijakan/prosedur terkait indikator dan ukuran kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi belum memadai Peningkatan pertanggung jawaban terhadap sumber daya dan pencatatannya telah diperbaiki secara berkelanjutan dan perlu ditingkatkan melalui evaluasi efektivitas pengawasan pengelolaan BMN, Keuangan, dan PBJ.

Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya sehingga indikator yang didapat dapat meningkat.

IKU 15. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	76,10	73,89	80,95	70	94,52	135,03	80	118,15

Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d. 30 September 2022 (Triwulan IV 2021 s.d Triwulan III 2022) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember 2022 (Triwulan IV Tahun 2022). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran tersebut Ditjen Perikanan Budidaya mencapai 94,52% (293 tuntas dari 310 rekomendasi).

Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan penyelesaian tindak lanjut guna mendukung kegiatan prioritas KKP dengan capaian yakni sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp196.000.000.

Lebih lanjut, upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja diantaranya:

1. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait
3. monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

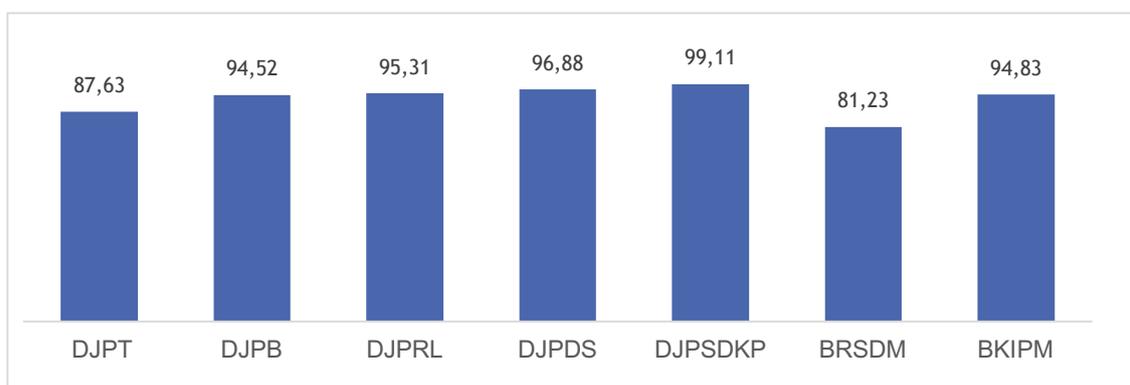
Kendala yang dihadapi untuk pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi adalah keterlambatan penyampaian laporan tindak lanjut sehingga akan diperhitungkan sebagai capaian pada periode triwulan IV tahun 2022. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan Perikanan Budidaya yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang



triwulan IV tahun 2022 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah ; (i) koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan (ii) koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

Rencana aksi untuk tahun berikutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan satker terkait terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP Ditjen Perikanan Budidaya menempati peringkat ke 5 sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini



Gambar 21. Perbandingan Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti

IKU 16. Persentase unit kerja lingkup DJPB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

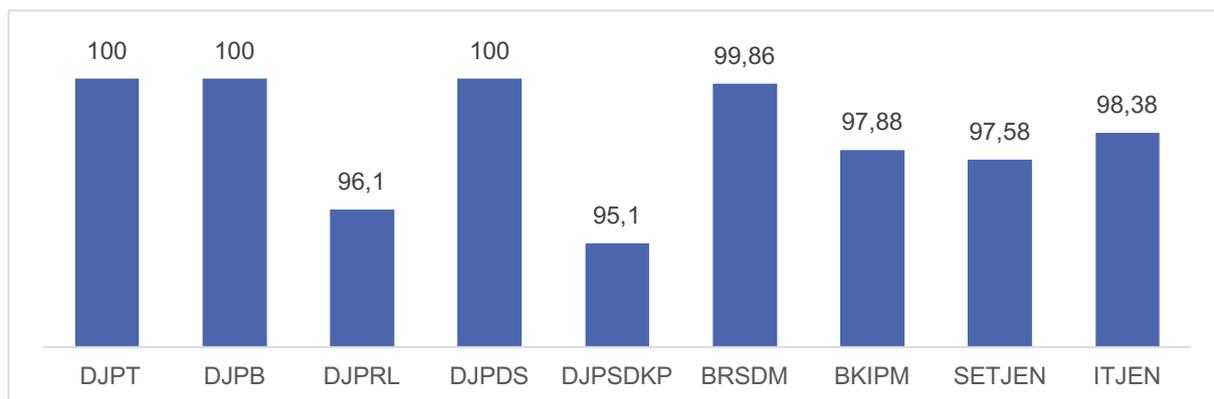
Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
51,58	72,33	92,47	100	99,92	86	100	116,28	90	111,11

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen Perikanan Budidaya yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 100% yang diperoleh dari 3 komponen yaitu pemenuhan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

Tingginya capaian kinerja pada Tahun 2022, menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Ditjen Perikanan Budidaya untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang perikanan Budidaya yang dilaksanakan, perlu dilakukan sosialisasi dan pengingat secara berkala kepada pegawai Ditjen Perikanan Budidaya yang sudah memiliki akun bitriks untuk secara proaktif



melakukan posting kegiatan. Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 22. Perbandingan Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Unit Eselon I Lingkup KKP

IKU 17. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	3	2	1	2	200	1	200

Ide/kreasi/adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Terkait unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik, salah satu syarat inovasi yang diusulkan adalah sudah diimplementasikan selama minimal satu tahun. Walaupun di targetkan hanya satu saja tetapi Ditjen Perikanan Budidaya telah menyampaikan usulan dua satker untuk dinilai yaitu BPBL Batam dan BPBAT Jambi. Usulan tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 952/DJPB.S3/OT.710/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Penyampaian Usulan Inovasi untuk KIPP Tahun 2022, berikut inovasi yang diusulkan:

Tabel 15. Inovasi dilingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang diikuti sertakan dalam KIPP Tahun 2022

NO.	JUDUL INOVASI	UNIT PENGUSUL	TIM/ PER SERORANGAN	TANGGAL IMPLEMENTASI
1	Sentra Kawasan Budidaya Dengan Sistem Logistik Benih yang Mandiri (SEKAWAN LOGIK)	BPBL Batam	TIM	12 Februari 2018
2	Pengembangan Induk Unggul Patin Nasional (PUSTINA)	BPBAT Sei Gelam	TIM	01 September 2018

Usulan inovasi dari Ditjen Perikanan Budidaya tercantum pada Kepmen KP Nomor 44/SJ Tahun 2022 tanggal 13 April 2022 tentang Daftar Penggagas Inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan usulan inovasi pada Nota Dinas Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan telah di submit melalui <https://sinovik.menpan.go.id/> pada tanggal 15 April 2022.



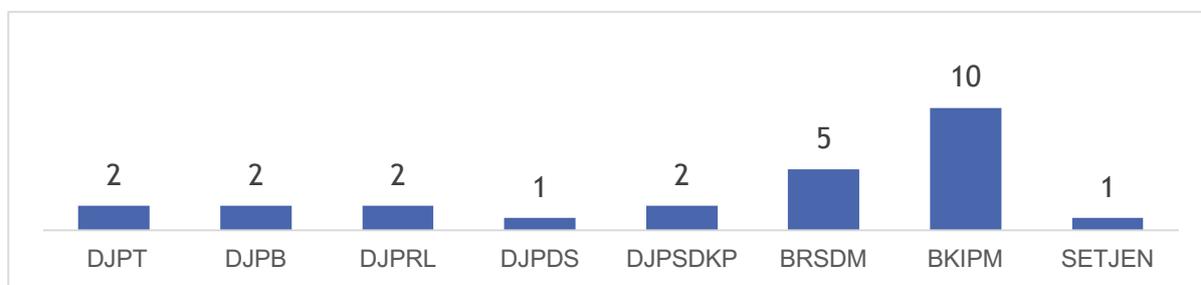
Proposal inovasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dinyatakan lulus administrasi pada tanggal 27 April 2022 pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB Nomor B/187/PP.00.05/2022.

Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) lingkup DJPB agar mengirimkan usulan nama inovasi pelayanan publik yang akan diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023, bahwa unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP tahun 2023. diharapkan UPP mampu melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan kemajuan teknologi merupakan solusi dalam memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan online perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat, akurat dan aman.

Permasalahan dalam pencapaian IKU ini antara lain Inovasi yang dapat diusulkan adalah inovasi yang sudah berjalan minimal selama 2 tahun sedangkan banyak inovasi di UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang baru berjalan pada tahun 2021 sehingga belum memenuhi syarat untuk diikutsertakan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan UPT lingkup DJPB agar bisa menciptakan inovasi lainnya, diharapkan inovasi yang telah ada dapat diterapkan dan dapat diadopsi oleh unit kerja lainnya.

Ditjen Perikanan Budidaya secara konsisten setiap tahunnya mengajukan inovasi layanan untuk mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Gambar 23. Capaian IKU Inovasi Layanan Publik KKP Tahun 2022

IKU 18. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
8,3	8,8	8,8	75,48	86,80	76	86,15	114,87	80	107,68

*terdapat perbedaan cara perhitungan untuk periode 2020-2024



Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP Tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/strategis berupa bantuan pemerintah bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (Puslatluh BRSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik pada tanggal 31 Oktober s.d. 11 November 2022, dengan melibatkan Penyuluh Perikanan, meliputi kegiatan Bantuan Pemerintah TA 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJURL), dan BRSDMKP, dengan hasil sebagai berikut:

Uji petik dilakukan pada 5 (lima) provinsi, yaitu 1) Provinsi Aceh, 2) Provinsi Jawa Barat, 3) Provinsi Jawa Tengah, 4) Provinsi Jawa Timur, dan 5) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 351 kelompok penerima bantuan dan 305 peserta pelatihan.

Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. **Pencapaian Tujuan (PT)**, diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenisbantuan, dengan bobot **80%**;
2. **Integrasi (IG)**, diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot **10%**; dan
3. **Adaptasi (AT)**, diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot **10%**.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tersebut, memperoleh nilai 86,15 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 16. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021

JENIS BANTUAN	JUMLAH*		SKOR			
	Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	TOTAL
Mesin Pakan Ikan	6	6	65,83	10,00	8,33	84,17
Karamba Jaring Apung(KJA)	34	34	70,29	10,00	9,41	89,71
Bioflok	42	40	61,75	9,88	7,25	78,88
Excavator	7	7	75,71	9,29	9,29	94,29
Pengelolaan IrigasiTambak Partisipatif(PITAP)	15	15	78,67	9,83	6,00	94,50
Total DJPB	104	102	68,28**	9,88**	7,99**	86,15**

Keterangan:

*Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

IKU 19. Nilai IKPA DJPB

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	95,33	90,90	91,27	89	92,56	104,00	90	102,84

*ada perubahan perhitungan di Tahun 2022



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output* belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga.

IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian *Output*.

IKPA menjadi IKU di lingkup KKP yang diturunkan ke seluruh Satuan kerja (satker) yang memiliki DIPA dengan dana Rupiah Murni. Satker tersebut memiliki kewajiban melaksanakan anggaran dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan meningkatkan capaian IKPA di lingkungannya. Berikut perubahan IKPA sebagai dampak reformulasi IKPA.

No	Indikator	Bobot 2021	Bobot 2022
1	Revisi DIPA	5	10
2	Deviasi Hal II DIPA	5	10
3	Pagu Minus	5	Tidak diperhitungkan
4	Data Kontrak	10	10
5	Pengelolaan UP dan TUP	8	10
6	LPJ Bendahara	5	Tidak diperhitungkan
7	Dispensasi SPM	5	5
8	Penyerapan Anggaran	15	20
9	Penyelesaian Tagihan	10	10
10	Capaian Output	17	25
11	Retur SP2D	5	Tidak diperhitungkan
12	Renkas	5	Tidak diperhitungkan
13	Kesalahan SPM	5	Tidak diperhitungkan

Pada tahun 2022 sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2022, IKPA mengalami reformulasi yang menyebabkan perubahan jumlah indikator, jumlah pembobotan indikator, dan formula dari setiap indikator. Hal ini berdampak pada aplikasi OMSPAN sebagai aplikasi yang digunakan untuk memonitor nilai IKPA belum dapat digunakan dengan maksimal sampai dengan akhir triwulan I. Dari 8 indikator yang dihitung pada tahun 2022, terdapat 2 indikator yang tidak dihitung di triwulan I yaitu penyerapan anggaran dan revisi DIPA. Selain itu indikator deviasi halaman III DIPA pada triwulan I dapat disesuaikan di bulan April dan indikator capaian *output* sampai dengan bulan Maret diberikan dispensasi pengisian sampai dengan tanggal 21 April 2022. Hal ini mengakibatkan nilai IKPA triwulan I belum optimal karena bobot indikator capaian *output* paling besar yaitu 25%.

Pada triwulan II terdapat kebijakan penambahan blokir anggaran sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penambahan Automatic



Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 yang mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah blokir anggaran sebesar Rp491.049.545.000. Sehubungan dengan kebijakan tersebut nilai blokir mandiri/*Automatic Adjustment* (AA) KKP Rp787.636.428.000 jika ditambahkan dengan blokir AA tahap pertama. Nilai blokir tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Selain itu juga berdampak pada nilai IKPA karena mempengaruhi beberapa indikator pada IKPA yaitu deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan capaian *output*. Berikut penjelasan blokir anggaran (AA) mempengaruhi capaian IKPA.

Deviasi Halaman III DIPA

Blokir anggaran (AA) mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan karena beberapa anggaran kegiatan terdampak blokir anggaran tersebut. Hal ini mengakibatkan deviasi antara rencana dengan realisasi menjadi tinggi sehingga nilai indikator deviasi halaman III DIPA menjadi tidak optimal.

Penyerapan Anggaran

Indikator penyerapan anggaran merupakan indikator yang terdampak dari blokir AA secara langsung. Dengan terblokirnya anggaran mengakibatkan anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga nilai penyerapan anggaran tidak dapat dicapai dengan optimal.

Capaian *Output*

Capaian *output* terdampak karena *output* dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan anggaran. Beberapa *output* tidak dapat dihasilkan dengan berkurangnya anggaran sehingga capaian *output* tidak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan di RKAKL atau progres kegiatan mundur sehingga capaian progress juga tidak dapat sesuai dengan target IKPA. Hal ini mengakibatkan nilai capaian *output* tidak maksimal di akhir triwulan II.

Pada triwulan III, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-228/PB/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atas Adanya Blokir Pagu Anggaran. Kebijakan tersebut mengatur perubahan kebijakan terkait dua indikator pada IKPA yaitu

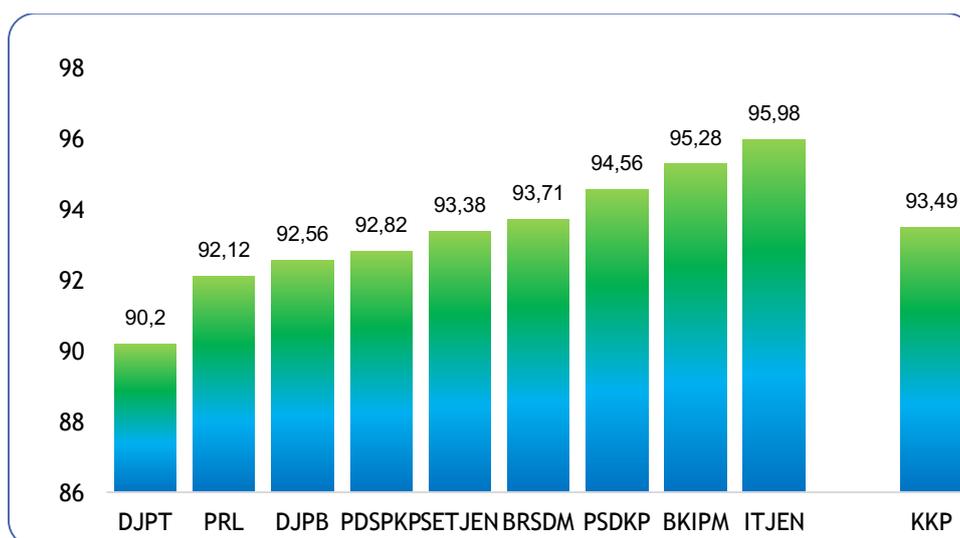
1. Indikator Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan pagu neto, yakni dengan mengecualikan blokir pagu anggaran dari pagu DIPA sebagai basis perhitungan target penyerapan anggaran triwulanan;
Indikator Capaian Output untuk komponen ketercapaian output menggunakan target progres output yang telah disesuaikan dengan perhitungan target penyerapan anggaran neto.
Pada awal tahun 2023 di periode penginputan capaian output bulan Desember, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait pelaporan data capaian output melalui surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-5/PB.2/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L Tahunan 2022 yang mengatur tentang beberapa hal yaitu:
2. Penilaian indikator kinerja capaian output pada IKPA tahunan 2022 didasarkan atas rasio Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) kumulatif sampai dengan/periode pelaporan bulan Desember 2022 terhadap Target RO pada DIPA;
3. Pembukaan sistem pada SAKTI dan OMSPAN (open period) secara nasional/terpusat sampai dengan batas cut off tanggal 13 Januari 2023;



Ketentuan pengisian RVRO untuk RO Khusus Satker yang terdampak blokir Automatic Adjustment dengan alokasi anggaran RO yang sebagian/seluruhnya terblokir, namun Target RO tidak mengalami perubahan/penyesuaian pada DIPA dengan mengisi RVRO sesuai dengan Target RO dengan memberikan penjelasan pada kolom keterangan dan menggunakan referensi 99; dan Satker dengan RVRO yang memiliki polarisasi capaian kinerja minimize dan/atau sesuai dengan kondisi riil di lapangan, seperti: RO bencana, perkara, dokumen perjalanan, izin tinggal, dan sejenisnya mengisi RVRO sesuai dengan Target RO dengan memberikan penjelasan pada kolom keterangan dan menggunakan referensi 99.

Berdasarkan data OMSPAN per tanggal 13 Januari 2023, nilai IKPA Perikanan Budidaya sebesar 92,56 (kategori baik) dengan capaian 104 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 89,00. Capaian IKPA KKP Tahun 2022 naik sebesar 1,34 poin atau 1,45 persen dari capaian tahun 2021 yaitu 92,15. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024, realisasi tahun 2022 telah mencapai 103,88 persen.

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian IKPA KKP, maka capaian IKPA Ditjen Perikanan Budidaya ini masih dibawah rata rata tetapi masih diatas capaian IKPA Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PRL.



Gambar 24. Capaian IKPA Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2022

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) Reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 pada tanggal 23 Maret 2022;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme Pelaporan Data Capaian *Output* Pada Aplikasi Sakti Tahun 2022 pada tanggal 12 April 2022;
3. Evaluasi capaian IKPA KKP sampai dengan triwulan II dan peningkatan capaian IKPA di triwulan berikutnya pada tanggal 7 Juli 2022;
4. FGD upaya peningkatan capaian IKPA yang menghadirkan KPPN Jakarta VI sebagai KPPN mitra satuan kerja kantor pusat KKP pada tanggal 18 Agustus 2022;

5. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) sampai dengan triwulan III dan peningkatan capaian IKPA di triwulan IV tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022;
6. FGD upaya peningkatan capaian pelaksanaan anggaran triwulan IV tahun 2022 pada tanggal 15 November 2022; dan
7. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 serta peningkatan capaian IKPA Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 5 Januari 2023

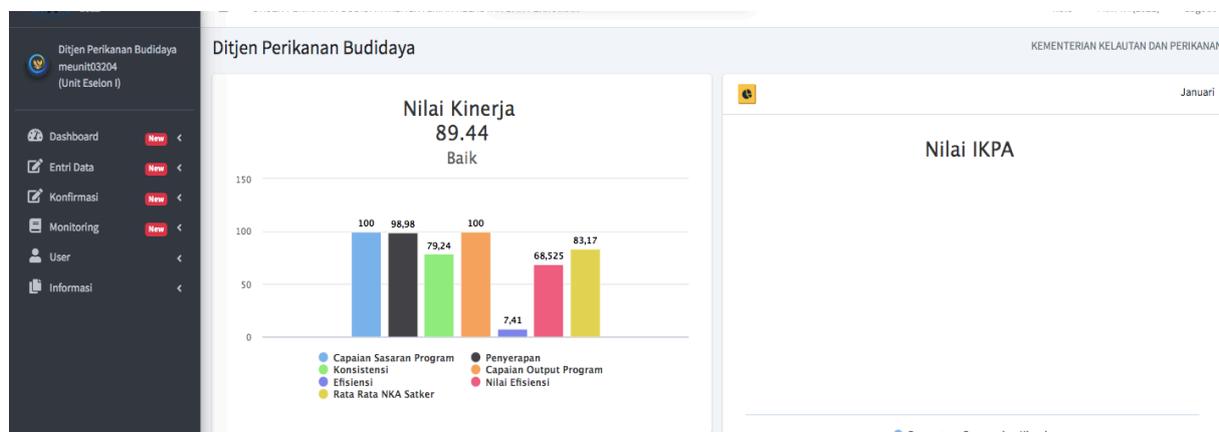
IKU 20. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup DJPB

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	68,35	89,89	86	89,44	104,19	89	100,49

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil dari penilaian atas evaluasi kinerja anggaran yang diukur melalui aplikasi SMART DJA. Pengukuran nilai ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada tahun 2022, terdapat pengembangan aplikasi SMART DJA yang mengganti dan melengkapi tampilan aplikasi SMART DJA tahun 2021. Aplikasi SMART DJA tahun 2022 baru rilis pada tanggal 14 Maret 2022.

Nilai Kinerja Anggaran ditargetkan dihitung pada akhir tahun dan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 86,00 sesuai dengan Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 2/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 hal Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

Realisasi IKU NKA Ditjen Perikanan Budidaya berdasarkan aplikasi SMART DJA per tanggal 13 Januari 2023 sebesar 89,44 (kategori baik) atau telah mencapai 104% dari target yang telah ditetapkan yaitu 86.



Gambar 25. Tangkapan Layar Nilai NKA Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dari aplikasi SMART DJA



Capaian NKA Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 sebesar 89,44 terdiri dari Capaian Sasaran Program (CSP) 100, penyerapan anggaran 98,98, konsistensi antara RPD dengan penyerapan anggaran 79,24, Capaian Keluaran/Output Program (CKP) 99,78, nilai efisiensi 68,52 dan rata-rata nilai satker sebesar 83,17. Berikut hasil tangkapan layar capaian NKA Ditjen Perikanan Budidaya pada aplikasi SMART DJA per tanggal 13 Januari 2023.

Dalam rangka mencapai target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dan meningkatkan capaian tahun 2022 atas capaian tahun 2021, Sekretariat Jenderal telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2021 dan Peningkatan Capaian Kinerja Anggaran Melalui Aplikasi SMART DJA serta Refreshment Bimbingan Teknis Aplikasi SMART DJA Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2022. Acara tersebut mengundang seluruh satker lingkup KKP dan menghadirkan narasumber dari Subdit Evaluasi Kinerja Anggaran dan Subdit Teknologi Informasi Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan. Selain itu juga disampaikan bahwa aplikasi SMART DJA tahun 2022 akan terus mengalami pengembangan salah satu *project* yang akan dicantumkan pada SMART DJA adalah menu *quick report*. Menu ini memfasilitasi user untuk dapat memonitor dan mengolah master data sesuai keperluan masing-masing.

Pada tanggal 20 April 2022, Kementerian Keuangan mengadakan rapat koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang mengundang seluruh Kementerian Negara/Lembaga. Pada rapat koordinasi ini juga mengumumkan capaian atas evaluasi kinerja anggaran tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat peringkat 6 pada kategori pagu sedang dengan nilai SMART DJA sebesar 95,49 dan nilai IKPA sebesar 92,42. Nilai Kinerja Anggaran yang diukur pada aplikasi SMART DJA memiliki bobot 60% dan IKPA yang diukur pada aplikasi OMSPAN memiliki bobot 40% pada pengukuran nilai kinerja anggaran gabungan. Capaian ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga Yang Diberikan Penghargaan Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya yaitu :

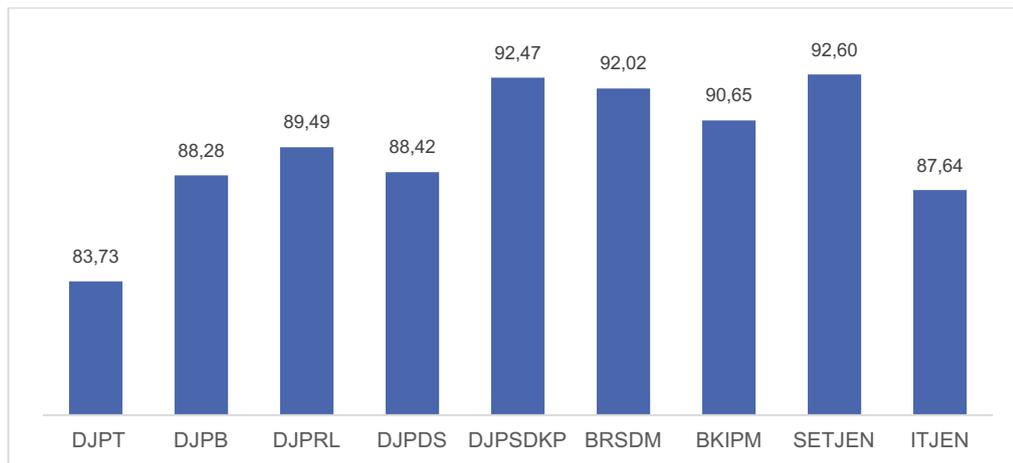
1. Nilai satker merupakan komponen 50% nilai dari nilai Unit Eselon I sehingga apabila nilai satker tidak dapat optimal maka secara integral ke level Unit Eselon I juga tidak dapat optimal.
2. Blokir AA mengakibatkan beberapa indikator pada SMART DJA tidak dapat optimal karena belum ada kebijakan lebih lanjut terkait penilaian kinerja anggaran di tengah adanya blokir AA. Indikator yang terdampak yaitu Konsistensi. Perbedaan antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran disebabkan adanya anggaran yang tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran 2023, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.



2. Melakukan himbauan kepada seluruh satuan kerja untuk mengisi capaian *output* di Sakti sehingga data tersebut dapat terintegrasi dan masuk di aplikasi SMART DJA yang digunakan untuk menilai kinerja anggaran.
3. Masing-masing satuan kerja melakukan koordinasi antara bagian program dan operator capaian *output* baik di SAKTI dan SMART DJA sehingga capaian *output* yang diinput pada aplikasi SAKTI telah sesuai.
4. Merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA/RPD sehingga capaian konsistensi dapat maksimal.
5. Masing-masing satuan kerja berkoordinasi dengan Biro Keuangan, Biro Perencanaan dan instansi eksternal terkait apabila terdapat kendala dalam pengaplikasian SMART DJA.



Gambar 26. Perbandingan Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran KKP Tahun 2022

IKU 21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	-	55,26	75	76,06	101,41	80	95,07

Indikator ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penghitungan terhadap indikator ini adalah:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target nilai yang ditetapkan tahun 2022 untuk IK ini adalah 75 (%). Pada periode sampai dengan triwulan 4 capaian indikator tingkat kepatuhan PBJ adalah 76,5% yang berarti sudah melampaui target tahunan. Sedangkan realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan



Layanan Barang Milik Negara (BMN) dengan capaian yakni sebesar 99,10% dari anggaran sebesar Rp550.000.000.

Untuk mendukung pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa ini, pada tahun 2022 kelompok pengelolaan BMN telah rutin melaksanakan pemantauan proses dan realisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi SIRUP. Pemantauan tersebut dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan tahap pelaksanaan PBJ serta dipastikan berjalan sesuai ketentuan.

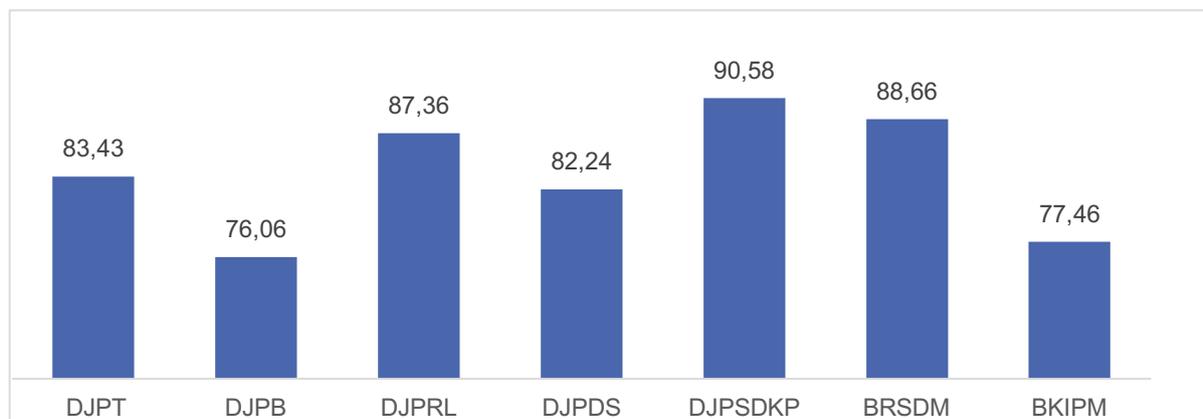
Pelaksanaan PBJ diutamakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) karena mengefektifitaskan proses pengadaan serta meningkatkan akuntabilitas. Dalam hal ini untuk memasatkan hal tersebut, tim PBJ Sekretariat DJPB telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan melalui SPSE baik pengadaan langsung melalui e-katalog maupun pengadaan secara tender.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, barang dan jasa hasil pengadaan harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 25 %. Untuk memastikan hal tersebut tim dari Pengelolaan BMN Sekretariat DJPB bersama dengan UKPBJ Biro Umum KKP rutin mengadakan pembahasan serta monitoring dan evaluasi mengenai TKDN. Monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan rekomendasi mengenai TKDN dan juga rekomendasi barang impor jika memang tidak ada barang lokal yang memenuhi syarat kandungan lokal.

Tindaklanjut atas rencana aksi pada triwulan 4 yakni, telah berkoordinasi dengan satker lingkup DJPB terkait rambu-rambu PBJ maupun hasil evaluasi Itjen atas penyedia pada tahun sebelumnya..Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Ketaatan dalam penyediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan
2. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa dipastikan berjalan sesuai ketentuan.



Gambar 27. Perbandingan capaian IKU tingkat kepatuhan PBJ Tahun 2022



IKU 22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

Realisasi 2017-2021					2022			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2022 thd target 2024
-	-	-	-	80	75	77,50	103,33	80	96,87

Indikator ini merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi (revaluasi aset) (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Target nilai yang ditetapkan tahun 2022 untuk IK ini adalah 75 (%). Pada periode sampai dengan triwulan 4 capaian indikator tingkat kepatuhan BMN adalah 76% yang berarti sudah melampaui target tahunan. Sedangkan realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan Layanan BMN dengan capaian yakni sebesar 99,10% dari anggaran sebesar Rp550.000.000

Siklus Pengelolaan BMN dimulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penilaian, Pengamanan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pemindahtanganan sampai dengan penghapusan merupakan tahapan yang merupakan tanggungjawab tim Pengelolaan BMN DJPB.

Kegiatan perencanaan kebutuhan BMN dimulai dari 2 (dua) tahun sebelumnya tiap triwulan ke 3. Kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) ini mencakup rencana kebutuhan pengadaan serta rencana pemeliharaan ,yang disusun sebagai panduan dalam penyusunan RKAKL.

Setelah pengadaan BMN selesai, BMN tersebut perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Proses PSP rutin dilaksanakan tiap tahunnya dan mencakup proses inventarisasi barang. Usulan PSP diolah tim Pengelolaan BMN untuk selanjutnya diteruskan ke Pengguna barang atau ke Pengelola Barang untuk menghasilkan Surat Keputusan.

Pemanfaatan BMN dapat dilaksanakan melalui sewa. Proses usulan Sewa BMN ini diverifikasi apakah dengan menyewakan BMN tersebut tidak mengganggu tuisi dan kegiatan sewa tersebut mendukung tuisi DJPB. BMN yang telah habis masa manfaatnya dapat dihapuskan, kegiatan ini dimulai dari inventarisasi, pembuatan usulan ke Pengguna Barang, persetujuan Pengelola Barang sampai lelang oleh KPKNL setempat. Segala proses pengelolaan BMN tersebut dicatat dan ditatausahakan melalui aplikasi SAKTI, yang tiap bulannya dilaksanakan rekonsiliasi serta penyusunan stok opname. Hasil penginputan



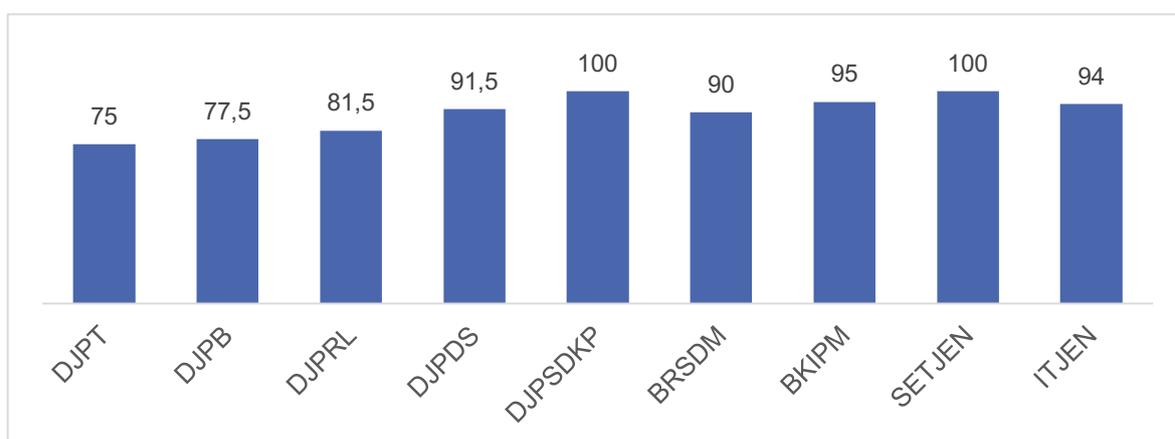
tersebut tiap akhir periode atau tiap semester, setelah dilakukan reviu oleh inspektorat jenderal, menghasilkan Laporan BMN dan Catatan atas Laporan BMN. Tindaklanjut atas rencana aksi pada triwulan 4 yakni, telah mendorong satker untuk melakukan update pada aplikasi SIMAN.

Kendala yang dihadapi yaitu masih kurang ketaatan satker dalam melaksanakan proses pengelolaan BMN pada tahun berjalan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah melakukan peningkatan pada beberapa aspek diantaranya yakni:

1. Memanfaatkan RKBMN dalam penyusunan RKA-K/L tahun berikutnya
2. Mendorong usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN satker untuk ditetapkan PSP nya oleh Kementerian Keuangan

Apabila dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP, sebagaimana disajikan pada grafik berikut:



Gambar 28. Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN lingkup KKP Tahun 2022.

Efisiensi

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CAK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CAK_i)} \times 100\%$$

E = Efisiensi

PAK_i = Pagu anggaran keluaran *i*

RAK_i = Realisasi anggaran keluaran *i*

CAK_i = Capaian keluaran *i*

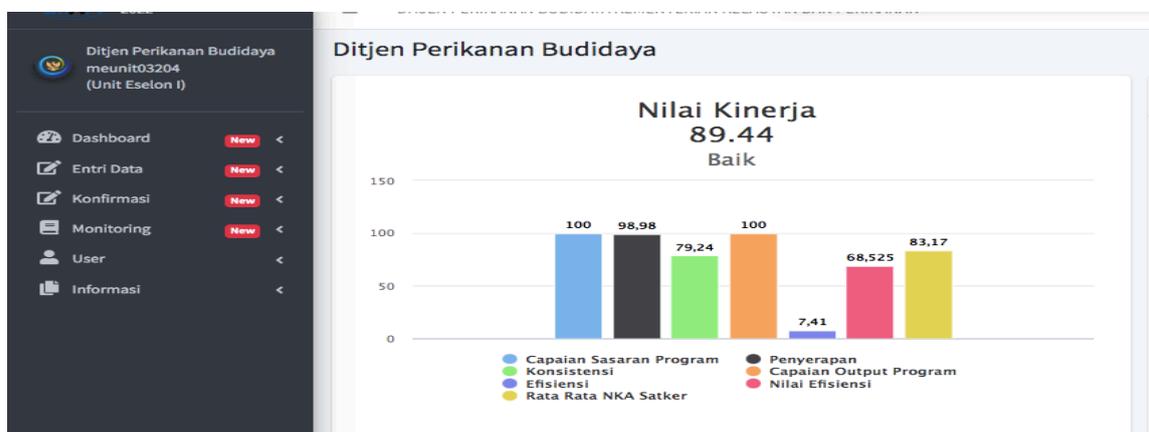


Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai efisiensi dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, diperoleh angka efisiensi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya pada Tahun 2022 sebesar 7,41% dari skala maksimal 20%. Mengacu pada hasil pengukuran efisiensi tersebut, kemudian ditransformasikan sehingga diperoleh angka nilai efisiensi anggaran BKIPM sebesar 68,52% dari skala maksimal 100%.



Gambar 29. Schreen shoot Nilai Efisiensi Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022 pada aplikasi SMART DJA

Hal ini membuktikan Ditjen Perikanan Budidaya sebagai salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan efisiensi anggaran dan termasuk dalam kategori cukup baik Ditjen Perikanan Budidaya telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas video confrence, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, dan moratorium pengadaan tanah baru. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Ditjen Perikanan Budidaya untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi perikanan Budidaya namun tetap menjaga kualitas kinerja.

Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran APBN 2022 pada Ditjen Perikanan Budidaya adalah sebesar Rp1.107.942.292.000,- kemudian mengalami beberapa kali proses Automatic Addjstment



menjadi Rp953.833.625.000,- sehingga berdasarkan data dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) sampai dengan tahun 2022, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya telah tercapai sebesar Rp944.650.891.776,- (99,04%), meningkat secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2021 pada triwulan yang sama yaitu sebesar 98,51%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya triwulan 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 dan 2022

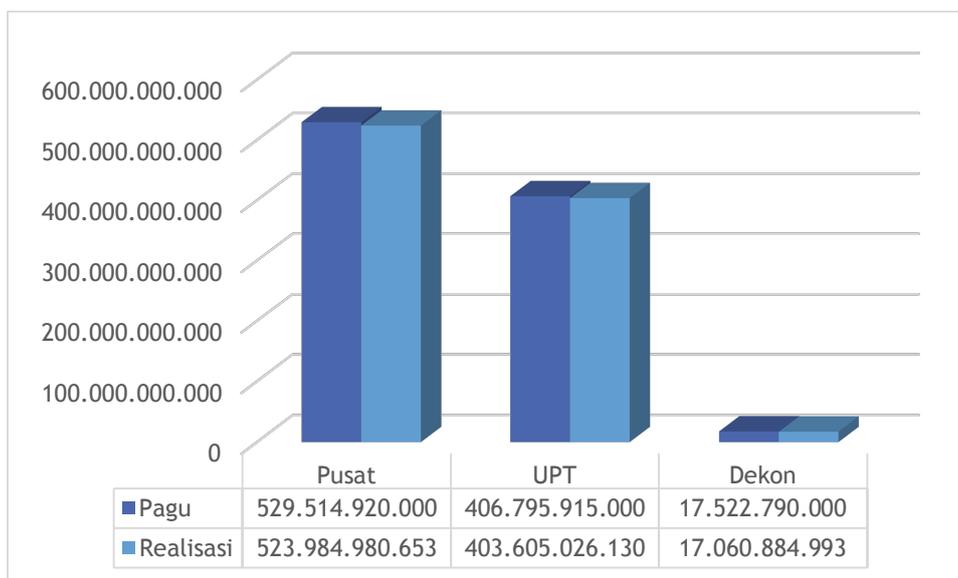
Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021*	782.065.357.000,-	770.399.106.401,-	98,51
2022	953.833.625.000,-	944.650.891.776,-	99,04

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budidaya TA 2022 tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp182.063.301.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp 560.777.298.000,-; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 210.993.026.000,-.

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya per Jenis Belanja Tahun 2021 dan 2022

Jenis Belanja	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	%
Pegawai	187.162.901.000	183.545.671.895	90,74	187.063.301.000	180.690.614.282	99,25
Barang	494.147.910.000	581.602.590.522	76,76	560.777.298.000	553.682.203.073	98,73
Modal	100.754.546.000	40.332.223.839	69,26	210.993.026.000	210.278.074.421	99,66
Total	782.065.357.000	805.480.486.256	79,11	953.833.625.000	944.650.891.766	99,04

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budidaya sampai dengan triwulan IV tahun 2022 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Modal, sedangkan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang cukup meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.



Gambar 30. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker UPT (99,21%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Dekon Provinsi (97,36%) sebagaimana berikut:

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 98,95% dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 99,21%. dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang 99,97% dan terendah pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 98,23%

3. Satker Dekonsentrasi Provinsi: Realisasi anggaran pada satker Dekonsentrasi Provinsi keseluruhan sebesar 97,36%. dengan capaian terbesar terdapat pada Provinsi Papua 100% dan terendah pada provinsi Bali 89,17%



Penutup

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan target antara target yang tercantum pada Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan PK DJPB Tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan baru dari pimpinan yang menambahkan program trobosan, selain adanya program trobosan, perubahan target ini dikarenakan beberapa indikator capaian tahun kemarin sudah melebihi target tahun ini.
2. Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan budidaya akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan Budidaya yang berkelanjutan. Dari hasil evaluasi capaian kinerja 22 IKU, 20 IKU (90,90%) capaiannya telah memenuhi atau melebihi target dan 2 IKU (9,10%) capaiannya belum memenuhi target.
3. IKU yang tidak mencapai target adalah IKU Rata-rata pendapatan pembudidaya yang mencapai 96,64% dari target dan IKU Produksi perikanan Budidaya yang hanya mencapai 89,98%

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Tidak tercapainya target produksi ikan dan pendapatan pembudidaya dikarenakan beberapa faktor diantaranya: Masih munculnya hama penyakit ikan, Pandemi Covid dan masih tingginya harga pakan.
- b. Perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan belum sepenuhnya optimal;

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Ditjen Perikanan Budidaya pada Tahun 2022, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar setiap unit kerja/satker lingkup Ditjen Perikanan Budidaya agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal; dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. PK awal Tahun 2022



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

<p>Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Sakti Wahyu Trenggono</p>	<p>Pihak Pertama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya</p>  <p>Tb. Haeru Rahayu</p>
--	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103
	2. Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000
2. Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat	3. Nilai PNB dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	21
3. Kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4. Sentra Kawasan Budidaya (Kawasan)	130
4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	5. Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	18,77
	6. Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,56
	7. Tenaga kerja yang terlibat (orang)	32.025
5. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8. Prosentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	9. Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	33
	10. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	80
	11. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) (Unit)	9
	12. Batas tertinggi Prosentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 (%)	≤1
	13. Nilai PM SAKIP DJPB (Nilai)	86,25
	14. Tingkat Maturitas SPIP (level)	3
	15. Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup	70

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Ditjen Perikanan Budidaya (%)	
	16. Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86
	17. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (Unit)	1
	18. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	75
	19. Nilai IKPA DJPB (Nilai)	89
	20. NKA lingkup DJPB (Nilai)	86
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPB (Nilai)	75
	22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPB (Nilai)	75

Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	796.314.416.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	133.385.090.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	459.713.405.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	110.460.000.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	92.755.921.000
2.	Program Dukungan Manajemen	329.836.466.000
Total Anggaran Ditjen/Badan Tahun 2022		1.126.150.911.000

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya

Sakti Wahyu Trenggono

Tb. Haeru Rahayu



Lampiran 2. PK Revisi Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	1. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	103
	2. Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya (Rp)	5.000.000
2. Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat	3. Nilai PNBP dari perikanan budidaya (Rp. Miliar)	21
3. Kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan	4. Sentra Kawasan Budidaya (Kawasan)	130
4. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	5. Produksi perikanan budidaya (Juta ton)	18,77
	6. Produksi ikan hias (miliar ekor)	1,56
	7. Tenaga kerja yang terlibat (orang)	23.348
5. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya	8. Presentase jumlah sampel residu yang memenuhi ketentuan (sampel bebas residu) (%)	97
6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik	9. Nilai PM PRB DJPB (Nilai)	33
	10. Indeks profesionalitas ASN DJPB (%)	80
	11. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) (Unit)	9
	12. Batas tertinggi Presentase nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya Tahun 2021 (%)	≤1
	13. Nilai PM SAKIP DJPB (Nilai)	80,01
	14. Tingkat Maturitas SPIP (level)	3
	15. Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup	70

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Ditjen Perikanan Budidaya (%)	
	16. Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86
	17. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	1
	18. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	75
	19. Nilai IKPA DJPB (Nilai)	89
	20. NKA lingkup DJPB (Nilai)	86
	21. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPB (Nilai)	75
	22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPB (Nilai)	75



Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	648.655.010.000
	Pengelolaan Perbenihan Ikan	102.387.847.000
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	339.977.200.000
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	129.978.081.000
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	78.313.882.000
2.	Program Dukungan Manajemen	304.841.830.000
Total Anggaran Ditembatkan Tahun 2022		953.536.840.000

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya


Sakti Wahyu Trenggono


Tb. Haeru Rahayu